

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir Kota Parepare;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi

- Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATARUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

- kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 7. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
 10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
 14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
 15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kota.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota yang bersangkutan.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
22. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP yang digambarkan pada peta sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman, skala kecamatan, kelurahan, dan rukun warga.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
29. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh

- batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 31. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 32. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 33. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 34. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
 35. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
 36. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 37. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang

- pertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah kota baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
38. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
 39. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
 40. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
 41. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
 42. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
 43. Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 44. Zona Ekosistem *Mangrove* adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan *subtract* lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 45. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
 46. Zona Perikanan adalah bagian dari kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

47. Sub-Zona Perikanan Tangkap adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
48. Sub-Zona Perikanan Budi Daya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
49. Zona Pertambangan adalah bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang digunakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
50. Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
51. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
53. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
54. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

57. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya.
58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
59. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
60. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
61. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
62. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
63. Indeks Hijau Biru Indonesia yang selanjutnya disingkat IHBI adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial.
64. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
65. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
66. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
67. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
68. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat

- bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
69. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
 70. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan Budi Daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 71. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 72. Program Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat PJM adalah suatu kumpulan program-program yang terpadu dalam rangka pembangunan, pengembangan di suatu kota untuk kurun waktu lima sampai dua puluh tahun.
 73. *Holding Zone* adalah Zona yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan ruang.
 74. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
 75. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
 76. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 77. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
 78. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah angka

- maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan.
79. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
80. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
81. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
82. *Transfer development right* yang selanjutnya disingkat TDR merupakan Teknik Pengaturan Zonasi yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga si pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Pesisir Kota Parepare ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas

966,47(sembilan ratus enam puluh enam koma empat tujuh) hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.

- (2) Batas-batas delineasi WP Kawasan Pesisir Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Teluk Parepare; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Bumi Harapan, dan Kelurahan Watang Bacukiki.
- (3) Delineasi WP Kawasan Pesisir Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas 728,73 (tujuh ratus dua puluh delapan koma tujuh tiga) hektare, meliputi:
 1. seluruh Kelurahan Cappa Galung dengan luas 89,98 (delapan puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare;
 2. seluruh Kelurahan Kampung Baru dengan luas 47,08 (empat puluh tujuh koma nol delapan) hektare;
 3. seluruh Kelurahan Lumpue dengan luas 482,87(empat ratus delapan puluh dua koma delapan tujuh) hektare;
 4. seluruh Kelurahan Sumpang Minangae dengan luas 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) hektare; dan
 5. seluruh Kelurahan Tiro Sompe dengan luas 49,58 (empat puluh sembilan koma lima delapan) hektare.
 - b. sebagian Kecamatan Ujung dengan luas 99,89 (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan) hektare, meliputi:
 1. seluruh Kelurahan Labukkang dengan luas 37,68 (tiga puluh tujuh koma enam delapan) hektare;
 2. seluruh Kelurahan Mallusetasi dengan luas 30,02 (tiga puluh koma nol dua) hektare; dan
 3. seluruh Kelurahan Ujung Sabbang dengan luas 32,19 (tiga puluh dua koma satu sembilan) hektare.
 - c. sebagian Kecamatan Soreang dengan luas 109,20 (seratus sembilan koma dua nol) hektare, meliputi:
 1. seluruh Kelurahan Kampung Pisang dengan luas 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) hektare;
 2. seluruh Kelurahan Lakessi dengan luas 17,41 (tujuh belas koma

empat satu) hektare; dan

3. seluruh Kelurahan Watang Soreang dengan luas 86,40 (delapan puluh enam koma empat nol) hektare.

(4) Delineasi WP Kawasan Pesisir Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP, meliputi:

- a. SWP I.A, mencakup seluruh Kelurahan Watang Soreang dengan luas 88,42 (delapan puluh delapan koma empat dua) hektare, terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B, mencakup seluruh Kelurahan Kampung Pisang, seluruh Kelurahan Lakessi, seluruh Kelurahan Mallusetasi, dan seluruh Kelurahan Ujung Sabbang dengan luas 94,62 (stigaenamembilan puluh empat koma enam dua) hektare, terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
- c. SWP I.C, mencakup seluruh Kelurahan Kampung Baru, seluruh Kelurahan Labukkang, dan seluruh Kelurahan Tiro Sompe dengan luas 138,38 (seratus tiga puluh delapan koma tiga delapan) hektare, terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6;
- d. SWP I.D, mencakup seluruh Kelurahan Cappa Galung dan seluruh Kelurahan Sumpang Minangae dengan luas 162,19 (seratus enam puluh dua koma satu sembilan) hektare, terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan
- e. SWP I.E, mencakup seluruh Kelurahan Lumpue dengan luas 482,87 (empat ratus delapan puluh dua koma delapan tujuh) hektare, terdiri atas Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

(5) Delineasi WP Kawasan Pesisir Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Pesisir Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP Kawasan Pesisir Kota Parepare sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa yang berdaya tahan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PL Kecamatan; dan
 - b. PL Kelurahan.

- (5) PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.5.
- (6) PL Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.6;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang;
 - e. jembatan timbang;
 - f. jembatan;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - h. pelabuhan pengumpul;
 - i. terminal khusus; dan
 - j. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor sekunder; dan
 - c. jalan lokal sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Andi Arsad terdapat di SWP I.A;
 - b. ruas jalan Lasinrang terdapat di SWP I.B;
 - c. ruas jalan Sultan Hasanuddin terdapat di SWP I.B;
 - d. ruas jalan Karaeng Burane terdapat di SWP I.B;
 - e. ruas jalan Baumassepe terdapat di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - f. ruas jalan Lingkar Parepare terdapat di SWP I.E; dan
 - g. ruas jalan Baso Daeng Patompo terdapat di SWP I.B.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

Paragraf 2
Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa tol Maros-Parepare terdapat di SWP I.D dan SWP I.E.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.

- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.6; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.3.

Paragraf 4
Terminal Barang

Pasal 11

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

Paragraf 5
Jembatan Timbang

Pasal 12

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.

Paragraf 6
Jembatan

Pasal 13

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
- b. SWP I.D pada Blok I.D.4 dan Blok I.D.5; dan
- c. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 7
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 14

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, berupa jaringan jalur kereta api Makassar-Parepare, terdapat di SWP I.E.

Paragraf 8
Pelabuhan Pengumpul

Pasal 15

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.6.

Paragraf 9
Terminal Khusus

Pasal 16

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.

Paragraf 10
Pelabuhan Perikanan

Pasal 17

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, berupa pangkalan pendaratan ikan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Bagian keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah pengelolaan limbah B3;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.E.
- (3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), terdapat di SWP I.E.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM), terdapat di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR), terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa gardu distribusi, terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan

- b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan serat optik, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - b. sentral telepon otomatis (STO), terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 - c. rumah kabel, terdiri atas:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.5; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *base transceiver station* (BTS), terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4 dan Blok I.D.5; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan pengendalian banjir, terdapat di SWP I.D dan SWP I.E.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 pada Lampiran III.E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (4) bangunan pengambil air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (5) jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa bangunan penampung air, terdiri atas:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.6;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (8) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan
 - c. hidran kebakaran.
- (9) Sambungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (10) Hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.6;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.2.

- (11) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (12) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 pada Lampiran III.F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 23

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah B3.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sub-sistem pengolahan setempat, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 pada Lampiran III.H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 25

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.5.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (7) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP I.E.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 pada Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
- d. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM; dan
- e. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 29

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.3, I.B.4 dan B.I.6;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dengan luas 220,65 (dua ratus dua puluh koma enam lima) hektare, meliputi:

- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
- b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan

- f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 177,92 (seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan dua) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 37,57 (tiga puluh tujuh koma lima tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 4,14 (empat koma satu empat) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.5;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.5; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
- b. SWP I.E pada Blok I.E.3.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 31

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dalam Pasal 28 huruf c, dengan luas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.

Paragraf 5
Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 32

Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dengan luas 2,24 (dua koma dua empat) hektare, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.

Paragraf 6
Zona Badan Air

Pasal 33

- (1) Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan luas 36,01 (tiga puluh enam koma nol satu) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (2) *Holding Zone* pada Zona Badan Air dengan kode BA dengan luas 18,64 (delapan belas koma enam empat) hektare, yaitu Sub-Zona Taman Kota dengan kode BA/RTH-2 terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4.
- (3) Peruntukan dan/atau fungsi Zona Badan Air dengan kode BA berubah

menjadi peruntukan ruang berdasarkan ketentuan pada ayat (2) setelah memperoleh izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Perikanan dengan kode IK;
- b. Zona Pertambangan dengan kode T;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- k. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Perikanan

Pasal 35

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dengan luas 8,89 (delapan koma delapan sembilan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,44 (satu koma empat empat) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 7,45 (tujuh koma empat lima) hektare, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.

Paragraf 2
Zona Pertambangan

Pasal 36

Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT, dengan luas 7,90 (tujuh koma sembilan nol) hektare, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan
Industri

Pasal 37

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan luas 4,17 (empat koma satu tujuh) hektare, terdapat SWP I.A pada Blok I.A.4.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 38

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dengan luas 13,22 (tiga belas koma dua dua) hektare, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 39

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, dengan luas 440,69 (empat ratus empat puluh koma enam sembilan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 96,88 (sembilan puluh enam koma delapan delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 329,29 (tiga ratus dua puluh sembilan koma dua sembilan) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.6;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 14,52 (empat belas koma lima dua) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.5; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 40

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, dengan luas 30,52 (tiga puluh koma lima dua) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.5 dan Blok I.B.6;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.6;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 12,65 (dua belas koma enam lima) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 9,84 (sembilan koma delapan empat) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 7
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 41

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 42

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, dengan luas 112,63 (seratus dua belas koma enam tiga) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan

- c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 81,87 (delapan puluh satu koma delapan tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 43

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, dengan luas 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok

- I.D.5; dan
e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 44

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 45

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, dengan luas 10,92(sepuluh koma Sembilan dua) hektare, terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6;
- c. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
- d. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l, dengan luas 8,54(delapan koma lima empat) hektare, terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.5.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Pesisir Kota Parepare.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 49

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP dan Blok pada WP Kawasan Pesisir Kota Parepare.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Pemerintah Daerah Kota Parepare;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. PJM pertama pada periode tahun 2022–2024;
 - b. PJM kedua pada periode tahun 2025–2029;
 - c. PJM ketiga pada periode tahun 2030–2034;
 - d. PJM keempat pada periode tahun 2035–2039; dan
 - e. PJM kelima pada periode tahun 2040–2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. aturan dasar; dan
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 51

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T;
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B; dan
 - d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun

- pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
- b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti dokumen AMDAL, dokumen UKL, UPL dan dapat berupa biaya dampak pembangunan.
- (5) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis pada masing-masing Zona atau Sub-Zona yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum; dan
 - c. JBAB minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. hidran;
 - c. lahan parkir; dan
 - d. utilitas perkotaan lainnya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel prasarana dan sarana minimal tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1 Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 56

- Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - c. aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - d. aturan dasar Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM; dan
 - e. aturan dasar Zona Badan Air dengan kode BA.

Pasal 57

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 8 (delapan) persen;
 2. GSB minimum 2 (dua) meter; dan
 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; dan
 2. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
 2. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
 2. menyediakan hidran;
 3. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
 4. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti, dan pos pemadam kebakaran;
 5. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
 6. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
 2. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan tempat duduk pengunjung;
 2. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
 3. menyediakan hidran;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
 5. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, dan pos pemadam kebakaran;
 6. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
 7. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. menyediakan tempat duduk pengunjung;
 2. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
 3. menyediakan hidran;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
 5. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti, dan pos pemadam kebakaran;
 6. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
 7. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
 2. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan tempat duduk pengunjung;
 2. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
 3. menyediakan hidran;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
 5. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan;
 6. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
 7. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.
- (6) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;

2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
 2. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
 2. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 3. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
 4. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.
- (7) Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 0 (nol) persen;
 2. KLB maksimum 0 (nol); dan
 3. KDH minimal 100 (seratus) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
 2. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; dan
 2. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan.

Pasal 59

Aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
 2. GSB minimum 2 (dua) meter; dan

3. JBAB minimal 4 (empat) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait.
 2. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
 3. menyediakan hidran;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
 5. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan;
 6. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;
 7. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
 8. menyediakan jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan cagar budaya hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi cagar budaya setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 60

Aturan dasar Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
 2. GSB minimum 2 (dua) meter; dan
 3. JBAB minimal 4 (empat) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
 2. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, dan pos pemadam kebakaran; dan
 3. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.

Pasal 61

Aturan dasar Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

- peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
1. KDB maksimum 0 (nol) persen;
 2. KLB maksimum 0 (nol); dan
 3. KDH minimal 0 (nol) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 0 (nol) meter;
 2. GSB minimum 0 (nol) meter; dan
 3. JBAB minimal 0 (nol) meter.

Paragraf 2
Aturan Dasar Zona Budi
Daya

Pasal 62

Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK;
- b. aturan dasar Zona Pertambangan dengan kode T;
- c. aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
- f. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- h. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- k. aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- l. aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 63

- (1) Aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan

3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
 2. GSB minimum 2 (dua) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan parkir tepi jalan;
 2. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
 3. menyediakan hidran;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 5. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola;
 6. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
 7. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
 2. GSB minimum 2 (dua) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
 2. menyediakan hidran;
 3. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 4. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan;
 5. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
 6. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.

Pasal 64

- (1) Aturan dasar Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, berupa aturan dasar Sub-Zona Peruntukkan Pertambangan Batuan dengan kode MBT.

- (2) Aturan dasar Sub-Zona Peruntukkan Pertambangan Batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 2. GSB minimum 3 (tiga) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan RTH;
 2. menyediakan lahan parkir;
 3. menyediakan hidran;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 5. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan;
 6. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;
 7. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
 8. menyediakan jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan pertambangan yang hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi pertambangan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 65

- Aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 2. GSB minimum 3 (tiga) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. menyediakan RTH;
2. menyediakan lahan parkir;
3. menyediakan tempat bongkar muat barang;
4. menyediakan hidran;
5. menyediakan akses pemadam kebakaran;
6. menyediakan jalur evakuasi bencana;
7. menyediakan jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi;
8. menyediakan jaringan drainase; dan
9. menyediakan bak sampah dengan pemilahan.

Pasal 66

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1 (satu); dan
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 2. GSB minimum 3 (tiga) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan tempat duduk pengunjung;
 2. menyediakan lokasi perdagangan untuk UMKM;
 3. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait;
 4. menyediakan parkir dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;
 5. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul;
 6. menyediakan bak sampah dengan pemilahan; dan
 7. menyediakan jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan pariwisata hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi pariwisata setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 67

(1) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, meliputi:

- a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode

R-3; dan

- c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 4. luas kaveling minimum 75 (tujuh puluh lima) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 3. JBAB minimal 8 (delapan) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan hidran;
 2. menyediakan akses pemadam kebakaran;
 3. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 5. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman.
 6. menyediakan drainase;
 7. menyediakan jaringan air bersih; dan
 8. menyediakan jaringan listrik.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 4. luas kaveling minimum 120 (seratus dua puluh) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 16 (enam belas) meter;
 2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan hidran;
 2. menyediakan akses pemadam kebakaran;

3. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 5. menyediakan Ruang Terbuka Hijau berupa taman;
 6. menyediakan drainase;
 7. menyediakan jaringan air bersih; dan
 8. menyediakan jaringan listrik.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 65 (enam puluh lima) persen;
 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 4. luas kaveling minimum 180 (seratus delapan puluh) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan hidran;
 2. menyediakan akses pemadam kebakaran;
 3. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 5. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman;
 6. menyediakan drainase;
 7. menyediakan jaringan air bersih; dan
 8. menyediakan jaringan listrik.

Pasal 68

- (1) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, meliputi:
- a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 - 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 60 (enam puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter; dan
 - 3. JBAB minimal 7 (tujuh) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jalur pejalan kaki;
 - 2. menyediakan hidran;
 - 3. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 - 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 - 5. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik;
 - 6. menyediakan drainase;
 - 7. menyediakan jaringan air bersih; dan
 - 8. menyediakan jaringan listrik.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 - 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 40 (empat puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 - 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan aturan parkir *on street* yang diatur oleh instansi terkait;
 - 2. menyediakan jalur pejalan kaki;
 - 3. menyediakan hidran;
 - 4. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 - 5. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 - 6. menyediakan jaringan air bersih; dan
 - 7. menyediakan jaringan listrik.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel

- ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 - 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan pengaturan parkir *on street* yang diatur oleh instansi terkait;
 - 2. menyediakan jalur pejalan kaki;
 - 3. menyediakan hidran;
 - 4. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 - 5. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 - 6. menyediakan jaringan air bersih; dan
 - 7. menyediakan jaringan listrik.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 65 (enam puluh lima) persen;
 - 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 - 3. KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 16 (enam belas) meter;
 - 2. GSB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan pengaturan parkir *on street* yang diatur oleh instansi terkait;
 - 2. menyediakan jalur pejalan kaki;
 - 3. menyediakan hidran;
 - 4. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 - 5. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 - 6. menyediakan jaringan air bersih; dan
 - 7. menyediakan jaringan listrik.

Pasal 69

Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1 (satu); dan
 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
 2. GSB minimum 3 (tiga) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan lahan parkir;
 2. menyediakan hidran;
 3. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 4. menyediakan drainase;
 5. menyediakan jaringan air bersih; dan
 6. menyediakan jaringan listrik.

Pasal 70

- (1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 40 (empat puluh) meter;

2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 3. JBAB minimal 7 (tujuh) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan lahan parkir;
 2. menyediakan hidran;
 3. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 5. menyediakan drainase;
 6. menyediakan jaringan air bersih;
 7. menyediakan jaringan listrik;
 8. menyediakan telekomunikasi; dan
 9. menyediakan jalan di sekitar kawasan perdagangan jasa skala kota dilengkapi lampu penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 24 (dua puluh empat) meter;
 2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan lahan parkir;
 2. menyediakan hidran;
 3. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 5. menyediakan drainase;
 6. menyediakan jaringan air bersih;
 7. menyediakan jaringan listrik; dan
 8. menyediakan telekomunikasi.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. KDB maksimum 80 (delapanpuluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 24 (dua puluh empat) meter;
 2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. menyediakan lahan parkir;
 2. menyediakan hidran;
 3. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 5. menyediakan jaringan air bersih;
 6. menyediakan jaringan listrik; dan
 7. menyediakan telekomunikasi.

Pasal 71

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 40 (empat puluh) meter;
 2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 3. JBAB minimal 7 (tujuh) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan lahan parkir;
 2. menyediakan hidran;
 3. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 4. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 5. menyediakan drainase;
 6. menyediakan jaringan air bersih;
 7. menyediakan jaringan listrik;
 8. menyediakan telekomunikasi; dan
 9. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos keamanan dan pos pemadam kebakaran.

Pasal 72

Aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf j, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1 (satu); dan
 3. KDH minimal 50 (lima puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan ruang pemilahan;
 2. menyediakan tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer; dan
 3. menyediakan pagar tembok keliling.

Pasal 73

Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
 2. GSB minimum 2 (dua) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan jalur pejalan kaki;
 2. menyediakan parkir;
 3. menyediakan hidran;
 4. menyediakan jalur evakuasi bencana;
 5. menyediakan lebar jalan minimal 6 (enam) meter;
 6. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 7. menyediakan drainase;

8. menyediakan jaringan air bersih;
9. menyediakan jaringan listrik; dan
10. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos keamanan dan pos pemadam kebakaran.

Pasal 74

Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf l, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1 (satu); dan
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 2. GSB minimum 4 (empat) meter; dan
 3. JBAB minimal 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan jalur pejalan kaki;
 2. menyediakan parkir;
 3. menyediakan hidran;
 4. menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 5. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
 6. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik;
 7. menyediakan drainase;
 8. menyediakan jaringan air bersih;
 9. menyediakan jaringan listrik;
 10. menyediakan telekomunikasi; dan
 11. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos keamanan dan pos pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus

Pasal 75

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona/Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi bertampalan dengan fungsi Zona/Sub-Zona lainnya, meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;

- b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
- c. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. menyediakan informasi mengenai evakuasi bencana;
 - b. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir;
 - c. kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya harus dilengkapi dengan saluran drainase, RTH, dan kolam retensi; dan
 - d. menyediakan jalur evakuasi.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. menyediakan informasi mengenai evakuasi bencana;
 - b. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan longsor;
 - c. kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya harus dilengkapi dengan saluran drainase, RTH, kolam retensi; dan
 - d. menyediakan jalur evakuasi.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyediakan alat peringatan dini kebakaran;
 - b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi kebakaran;
 - c. menyediakan akses kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - d. menyediakan hidran pilar.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
- (2) ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimum 10 (sepuluh) menit;
 - b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi bencana sekitar 400 – 600 (empat ratus sampai enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - c. lokasi tempat evakuasi bencana jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman;
 - d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - e. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 - f. bangunan eksisting berada diluar kawasan rawan bencana;
 - g. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
 - h. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.
- (3) ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi bencana sekitar 400 – 600 (empat ratus sampai enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - b. lokasi tempat evakuasi bencana jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman;
 - c. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - d. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi akhir dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 - e. bangunan eksisting berada diluar kawasan rawan bencana;
 - f. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
 - g. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai.
- (2) ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. menyediakan jalan inspeksi sungai, bangunan pengendali banjir, dan sebaran vegetasi;
 - b. menyediakan bangunan pengendalian banjir; dan
 - c. menyediakan jalur dan rambu evakuasi.
- (3) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku;
 - b. menyediakan pengamanan pantai; dan
 - c. menyediakan jalur dan rambu evakuasi.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 79

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.

Pasal 80

- (1) ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, terdiri atas:
 - a. perubahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. perubahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

- c. perubahan ketentuan tata bangunan;
 - d. perubahan ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan Blok.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. terdapat kesalahan peta dan/atau informasi;
 - b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - c. permohonan/usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan; dan/atau
 - d. terjadi kondisi *force majeure* yang berupa bencana alam luar biasa dan kejadian perang.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. kajian AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL; dan
 - b. persetujuan masyarakat sekitar.

Pasal 81

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mendorong perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan tujuan penataan ruang WP;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR;
 - c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
 - d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. kemudahan perizinan;
 - b. keringanan pajak;

- c. kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. subsidi prasarana;
 - f. pengalihan hak membangun;
 - g. penghargaan; dan/atau
 - h. ketentuan teknis lainnya.
- (4) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pengetatan persyaratan;
 - b. pengenaan pajak dan retribusi tinggi;
 - c. pengenaan denda;
 - d. pembatasan dan/atau penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, terdiri atas:

- a. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum diberlakukan Peraturan Zonasi dapat diberikan konfirmasi KKPR dengan syarat tidak melakukan pengembangan; dan
- b. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi yang disebabkan keterbatasan kepemilikan dan kemampuan pembiayaan pemilik lahan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak tanah dan atau/surat keterangan lurah, dapat diberikan konfirmasi KKPR setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh yang berbatasan langsung dengan dengan warga.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 83

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:

- a. TDR;
 - b. *bonus zoning*; dan
 - c. zona banjir.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 84

- (1) TDR dengan kode (a) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, merupakan Teknik Pengaturan Zonasi yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga si pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi.
- (2) TDR dengan kode (a) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
 - b. terdapat pernyataan tertulis diantara penerima dan pemberi; dan
 - c. pendapatan yang diterima dari adanya perubahan zonasi ini merupakan hak bagi pemilik lahan yang telah bersedia menyerahkan hak membangunnya.
- (3) TDR dengan kode (a) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada:
 - a. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1;
 - b. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - e. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - f. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - g. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU;
 - h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - i. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
 - l. Zona Transportasi dengan kode TR.

Pasal 85

- (1) *Bonus zoning* dengan kode (b) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, merupakan Teknik Pengaturan Zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan imbalan dan/atau kompensasi pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu.
- (2) Penerapan *bonus zoning* dengan kode (b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus memenuhi persyaratan administratif; dan
 - b. harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat gambar *site plan* atau rencana tapak yang telah sesuai dengan arahan teknis rencana kota, desain gambar arsitektur bangunan, serta dokumen detail mengenai rencana perhitungan bangunan yang diinginkan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kajian lingkungan;
 - b. kajian lalu lintas;
 - c. kajian daya dukung dan daya tampung;
 - d. kajian keserasian lingkungan; dan/atau
 - e. kajian teknis lainnya yang dibutuhkan.
- (5) *Bonus zoning* dengan kode (b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada:
 - a. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1;
 - b. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - g. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - h. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - i. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - j. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;

- l. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
- m. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- n. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- o. Zona Transportasi dengan kode TR.

Pasal 86

- (1) Zona banjir dengan kode (i) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c, merupakan ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir.
- (2) Penerapan Zona banjir dengan kode (i) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir;
 - b. konstruksi bangunan tahan banjir;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini; dan
 - d. pengembangan jalur evakuasi.
- (3) Zona banjir dengan kode (i) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - e. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM;
 - f. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - j. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - k. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - l. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - m. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU;
 - n. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - o. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - p. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;

- q. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- r. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- s. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 87

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX SANKSI

Pasal 88

Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Pesisir Kota Parepare adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Pesisir Kota Parepare dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota ini dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang Kota tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Wali Kota ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di WP Kawasan Pesisir Kota Parepare yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan

akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2022

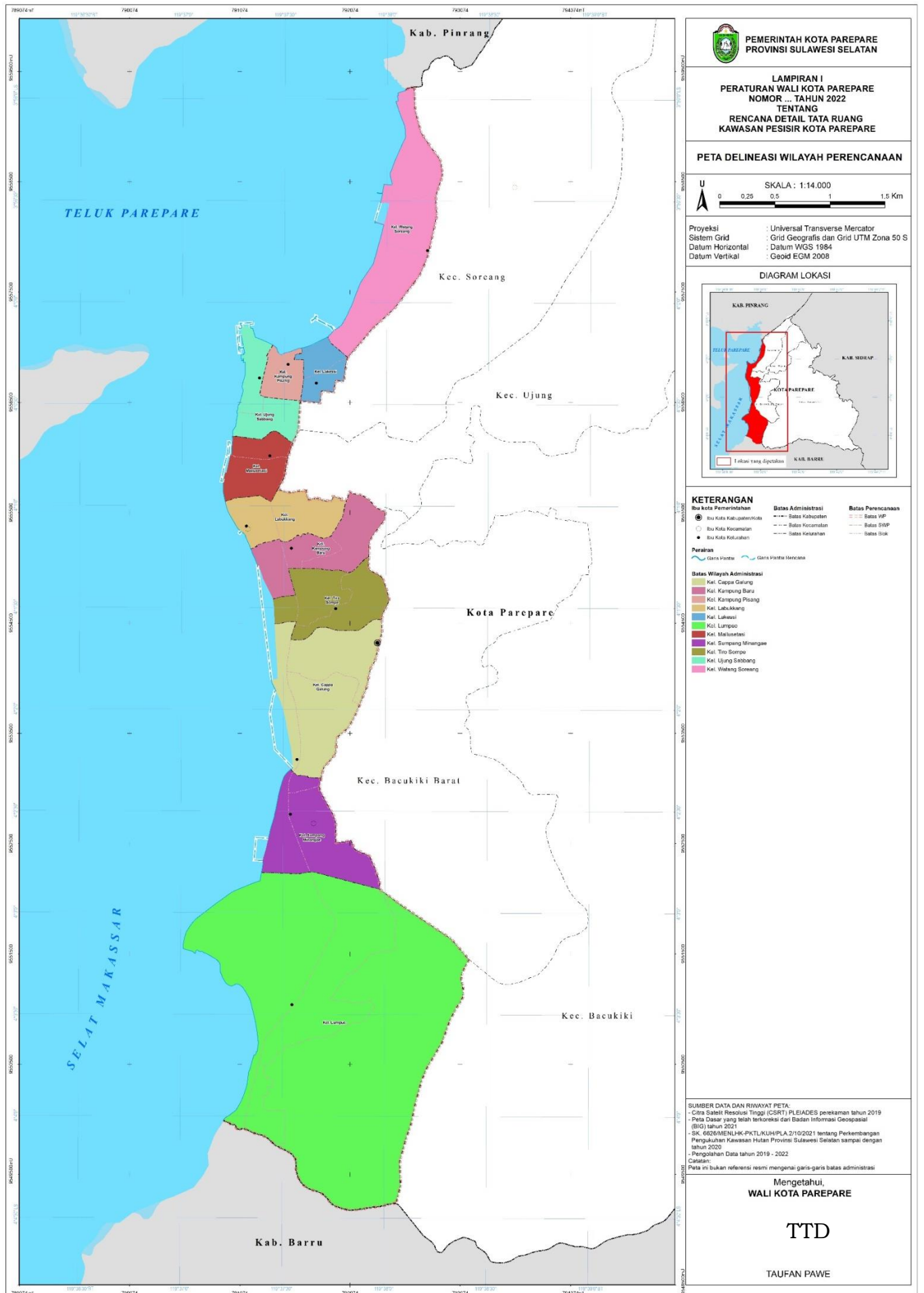
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 55

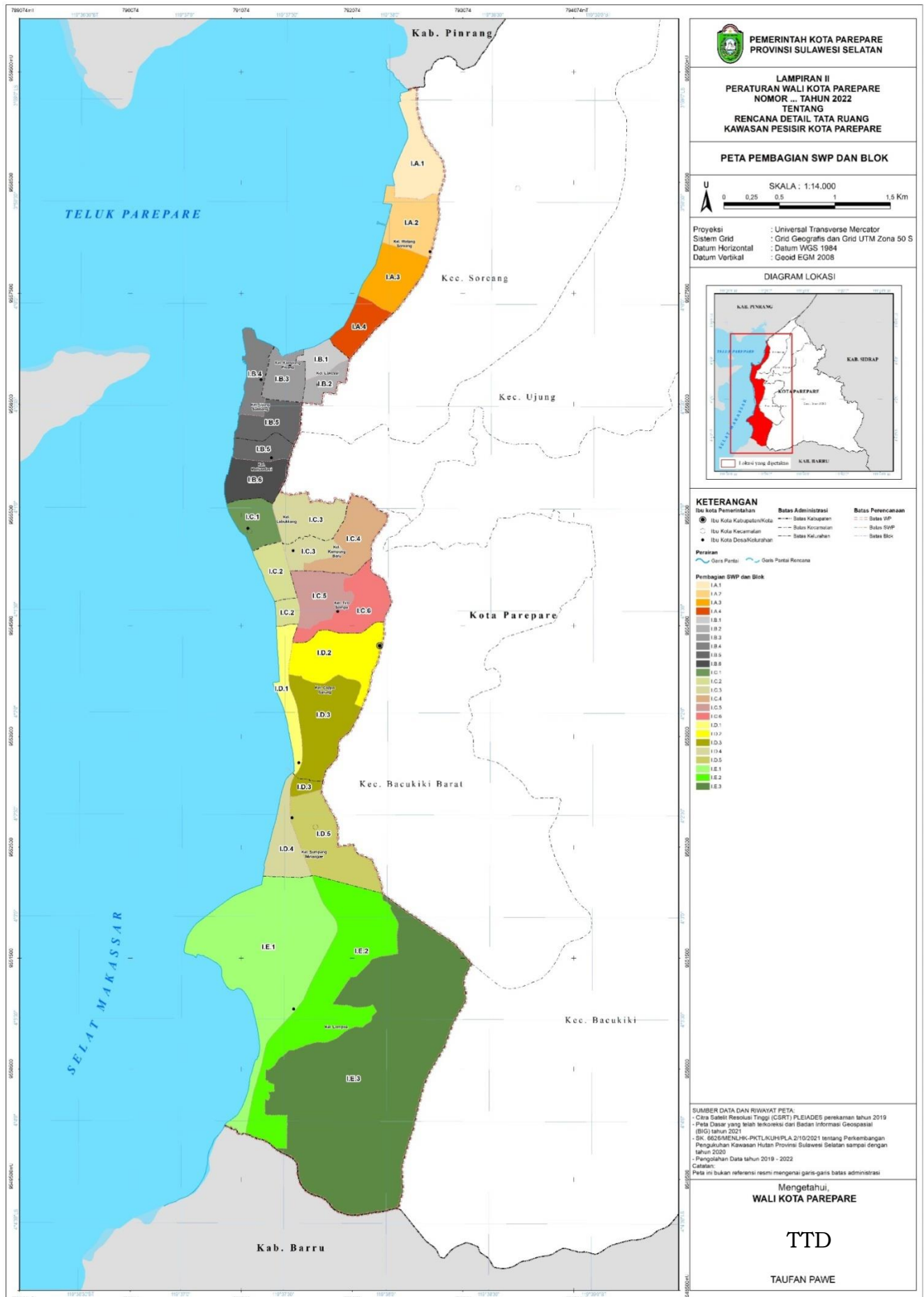
LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURWANA

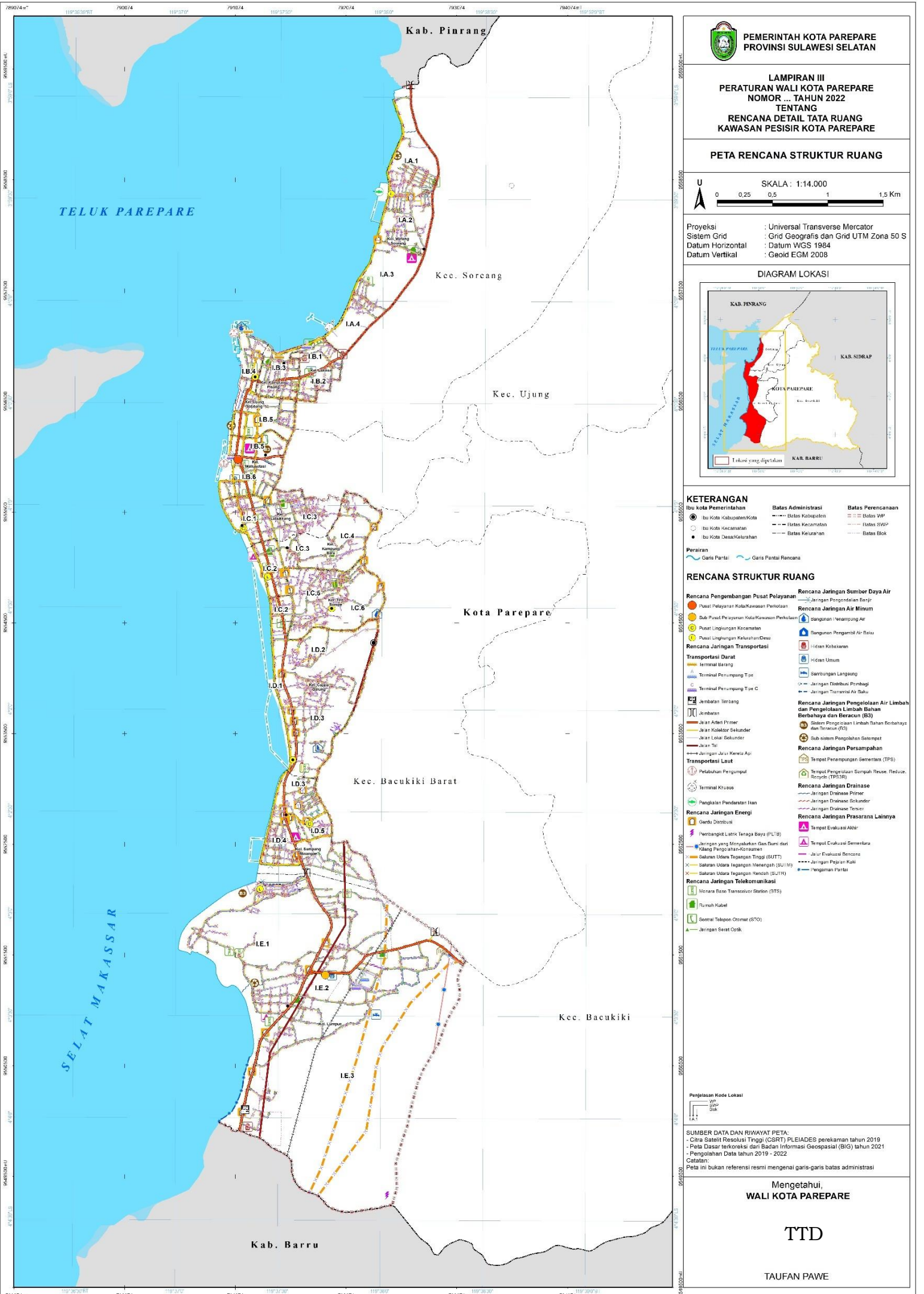
LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

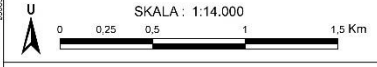
NURWANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



PEREMPTORIAN
 LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN**
- Ibu Kota Pemerintahan
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Perencanaan
 - Batas WP
 - Itas SWP
 - Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 - Pusat Lingkungan Kecamatan
 - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
- Rencana Jaringan Transportasi**
- Terminal Bersejarah
 - Terminal Perumpong Tipe A
 - Terminal Perumpong Tipe B
 - Terminal Perumpong Tipe C
 - Jembatan
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Tali
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Pejabat Perumpong
 - Terminal Khusus
 - Pangkalan Pendaratan Ikan
- Rencana Jaringan Energi**
- Gardu Distribusi
 - Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
 - Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dan Bidang Pengalihan-Konsumsi
 - Sekeloa Utama Tegangan Tinggi (SUTT)
 - Sekeloa Utama Tegangan Menengah (SUTM)
 - Sekeloa Utama Tegangan Rendah (SUTR)
- Rencana Jaringan Telekomunikasi**
- Rumah Kabel
 - Sentral Telepon Otomatis (STO)
 - Jaringan Serat Optik
- Rencana Jaringan Pengolahan Sumber Daya Air**
- Jaringan Pengendalian Banjir
 - Rencana Jaringan Air Minum
 - Sungai/Perampok Air
 - Rampungan Pengalihan Air-Baku
 - Saluran Kolektor
 - Saluran Pembuangan
 - Saluran Pengalihan Air-Baku
 - Saluran Pengalihan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Sistem Pengalihan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Sub-sistem Pengalihan Selampit
- Rencana Jaringan Persampahan**
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - Tempat Pengalihan Sampah Reuse/Reduce/Recycle (TPSR)
- Rencana Jaringan Drainase**
- Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**
- Tempat Evaluasi Alir
 - Tempat Evakuasi Bencana
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Jaringan Pajangan Kaki
 - Pengaman Pantai

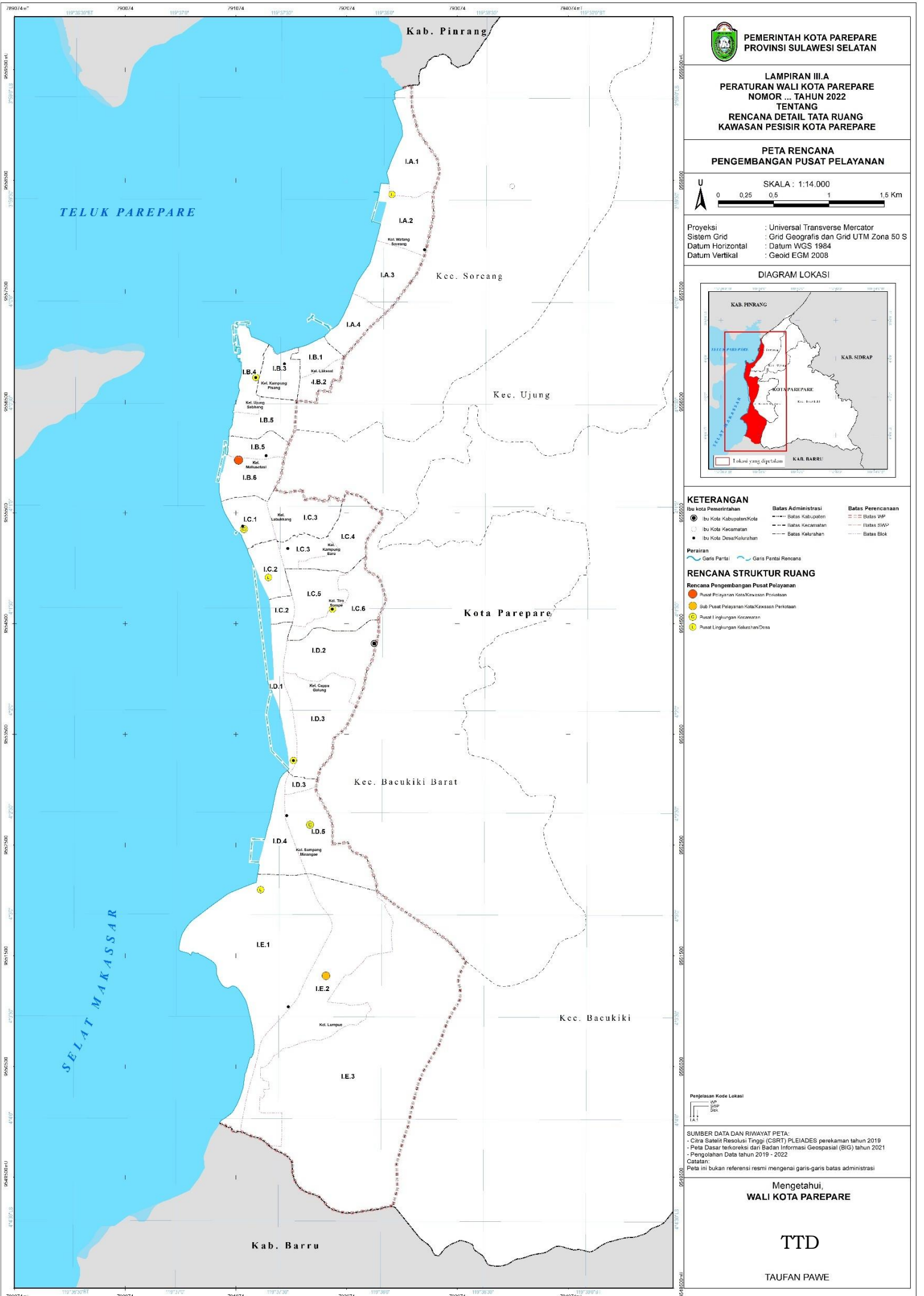
Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019
 - Peta Dasar terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 - Pengalihan Data tahun 2019 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA PAREPARE

TTD
 TAUFAN PAWE

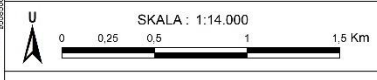
LAMPIRAN III.A
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA
 PAREPARE



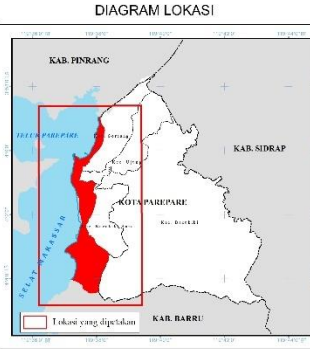
PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.A
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

PETA RENCANA
PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

● Ibu kota Pemerintahan	--- Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas 500m
	--- Batas Kelurahan	--- Batas Blok

Perairan
 ~~~~~ Garis Pantai      ~~~~~ Garis Pantai Rencana

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkrungan Kecamatan
- Pusat Lingkrungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi

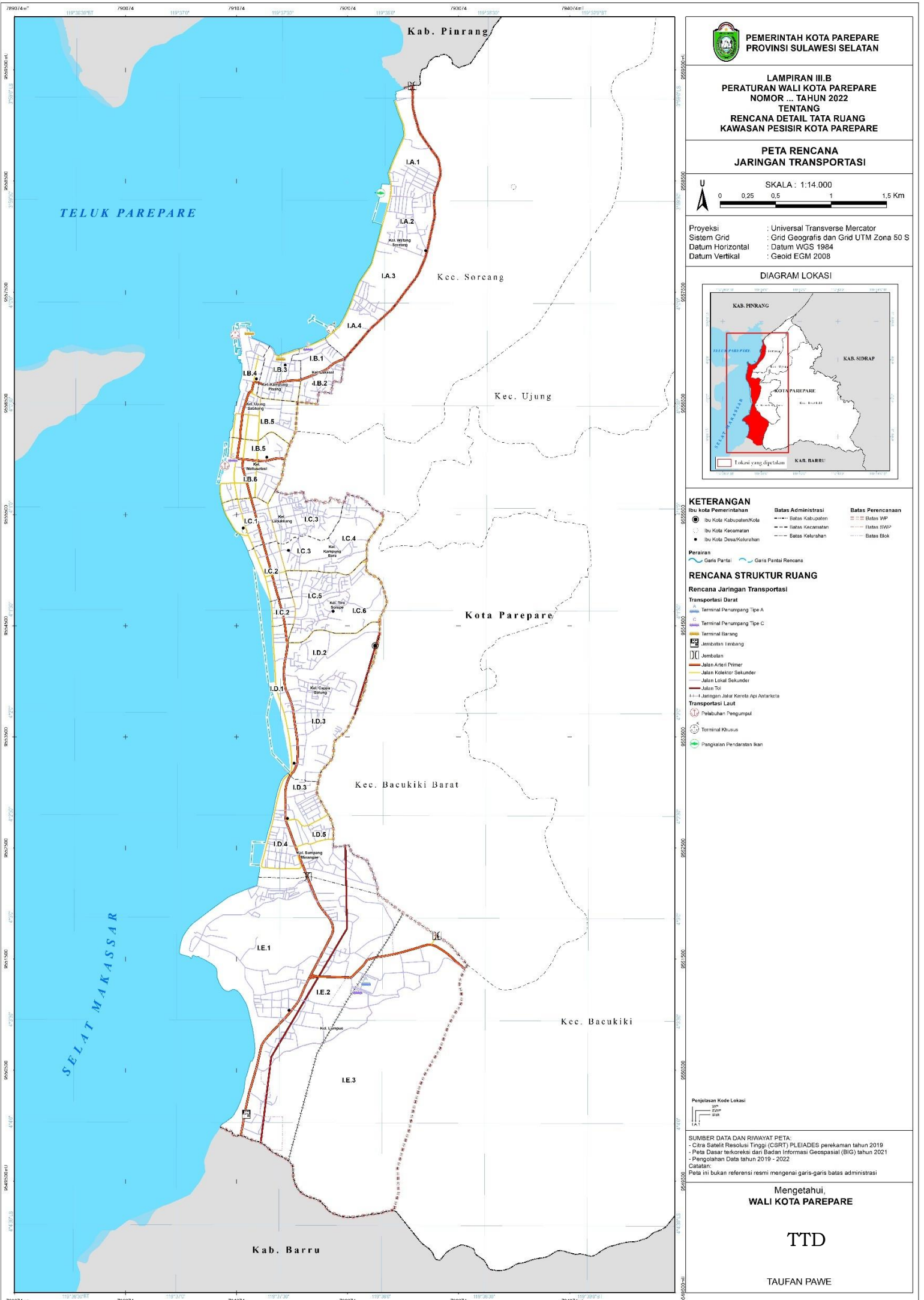
|    |    |
|----|----|
| IA | WP |
| IB | WP |
| IC | WP |
| ID | WP |
| IE | WP |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019  
 - Peta Dasar terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 - Pengalihan Data tahun 2019 - 2022  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**WALI KOTA PAREPARE**

**TTD**  
 TAUFAN PAWE

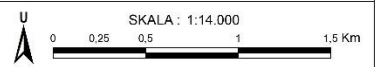
LAMPIRAN III.B  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

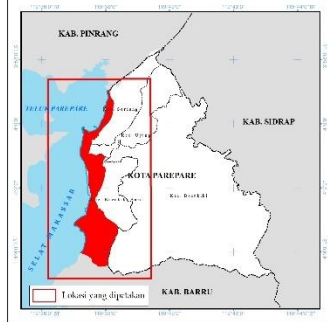
**LAMPIRAN III.B**  
**PERATURAN WALI KOTA PAREPARE**  
**NOMOR ... TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE**

**PETA RENCANA**  
**JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



- KETERANGAN**
- Ibu kota Pemerintahan
  - Ibu Kota Kabupaten/Kota
  - Ibu Kota Kecamatan
  - Ibu Kota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi
    - Batas Kabupaten
    - Batas Kecamatan
    - Batas Kelurahan
  - Batas Perencanaan
    - Batas WP
    - Batas 5000'
    - Batas Blok
  - Perairan
    - Garis Pantai
    - Garis Pantai Rencana

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

- Rencana Jaringan Transportasi**
- Transportasi Darat**
- Terminal Perumpang Tipe A
  - Terminal Perumpang Tipe C
  - Terminal Barang
  - Jembatan Timbang
  - Jembatan
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Kolektor Sekunder
  - Jalan Lokal Sekunder
  - Jalan Tol
  - Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota
- Transportasi Laut**
- Pelabuhan Pengumpul
  - Terminal Khusus
  - Pangkalan Pendaratan Ikan

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP  
 SKP  
 WSK  
 KA

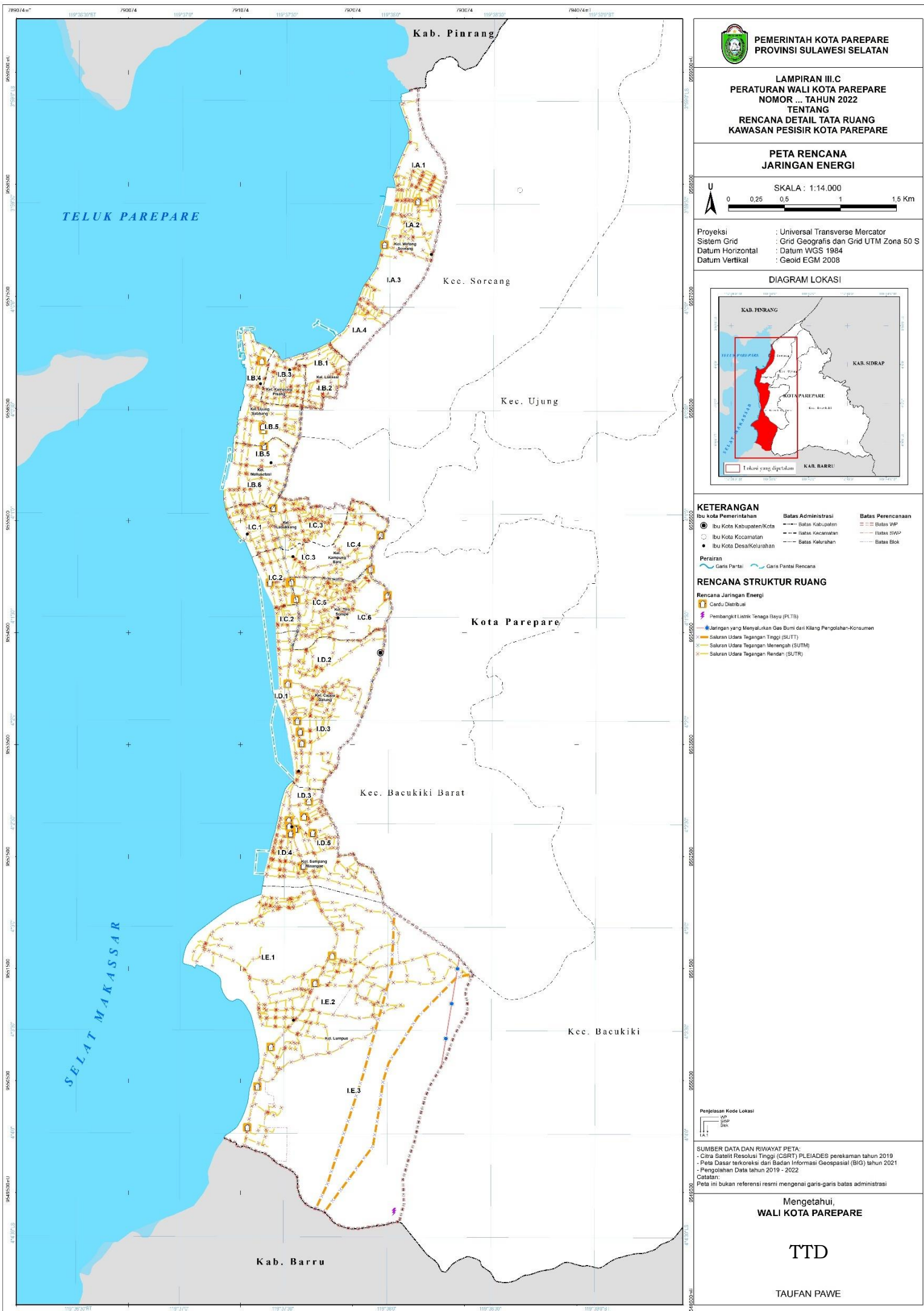
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019  
 - Peta Dasar terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 - Pengambilan Data tahun 2019 - 2022  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**WALI KOTA PAREPARE**

**TTD**

**TAUFAN PAWE**

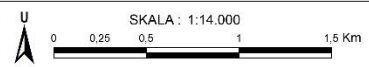
LAMPIRAN III.C  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAMPIRAN III.C  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR ... TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE**

**PETA RENCANA  
 JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

- Ibu kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas 5000'
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

- Rencana Jaringan Energi
  - Cardu Distribusi
  - Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
  - Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumsi
  - Sakuran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
  - Sakuran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
  - Sakuran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

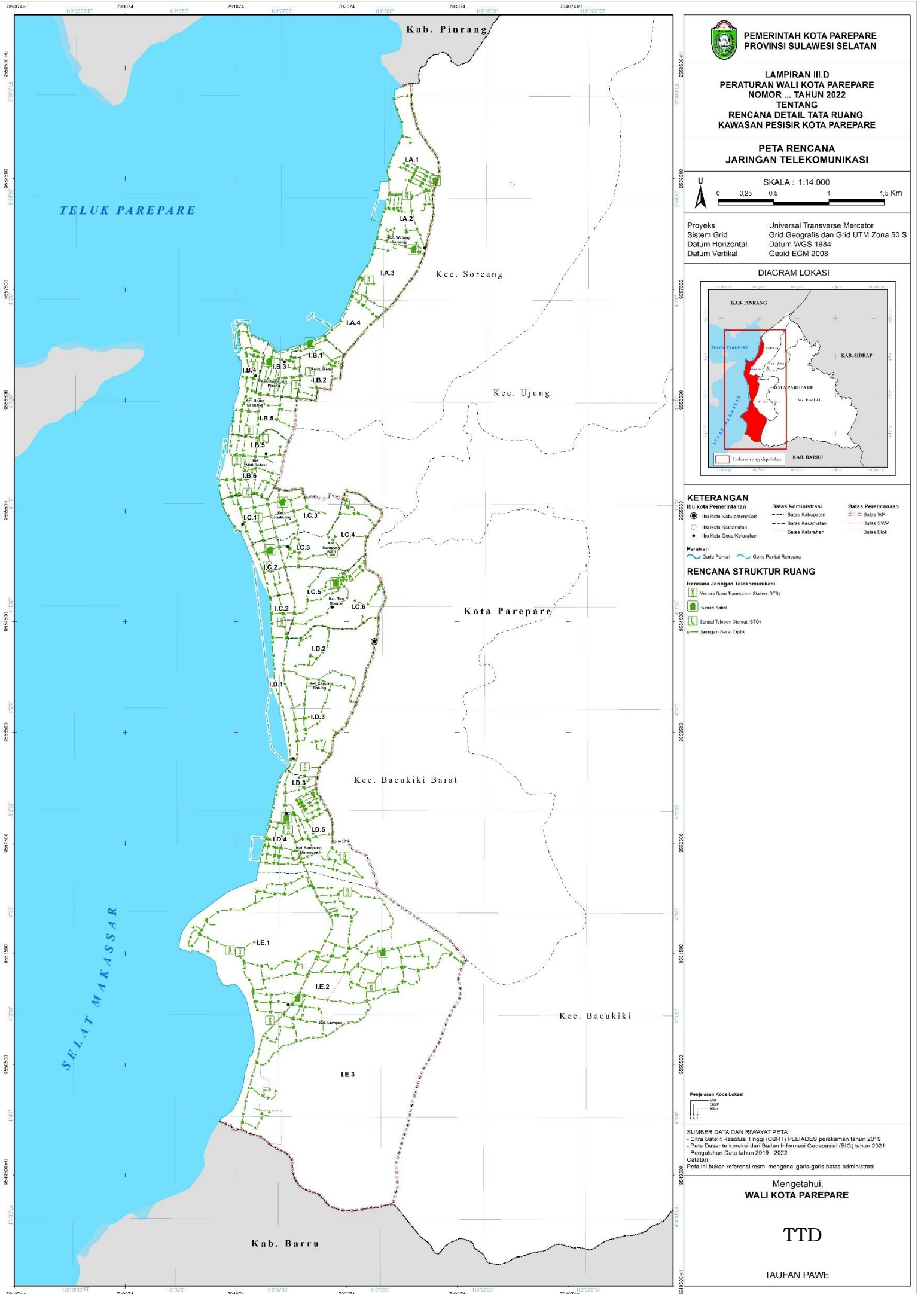
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019  
 - Peta Dasar terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 - Pengolahan Data tahun 2019 - 2022  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**WALI KOTA PAREPARE**

**TTD**

**TAUFAN PAWE**

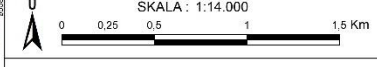
LAMPIRAN III.D  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA  
 PAREPARE



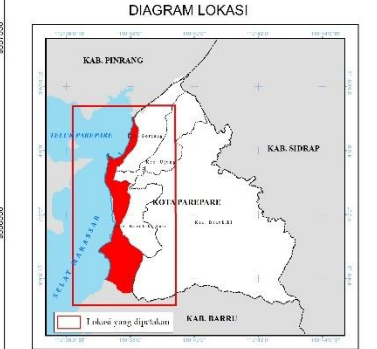
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAMPIRAN III.D  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR ... TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE**

**PETA RENCANA  
 JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN**
- Ibu kota Pemerintahan
  - Ibu Kota Kabupaten/Kota
  - Ibu Kota Kecamatan
  - Ibu Kota Desa/Kelurahan
  - Batas Administrasi
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Batas Perencanaan
  - Batas WP
  - Batas 500m
  - Batas Blok

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Rencana Jaringan Telekomunikasi**
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
  - Rumah Kabel
  - Sentral Telepon Otomat (STO)
  - Jaringan Serat Optik

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP  
 SKP  
 BK  
 IA.1

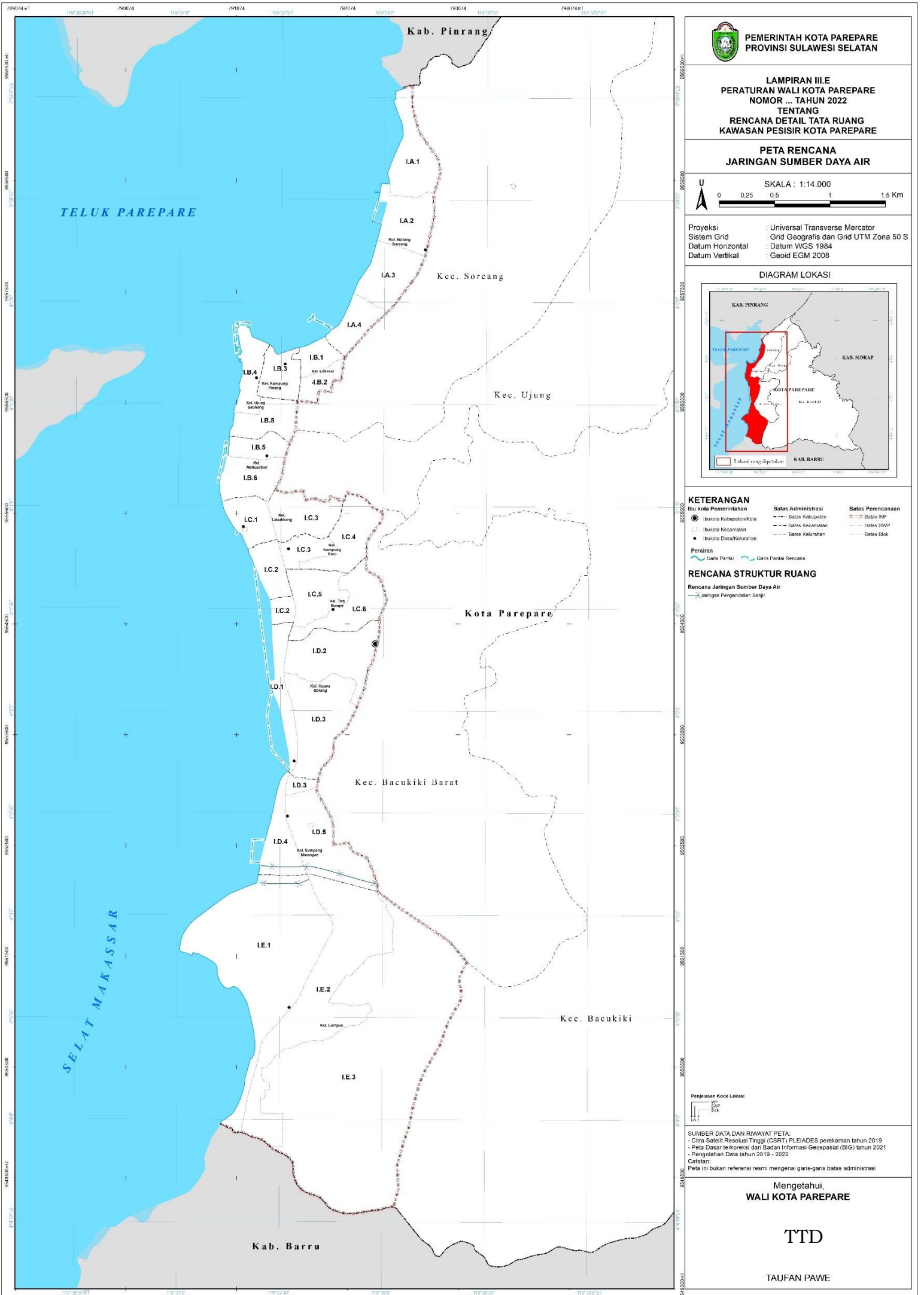
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019  
 - Peta Dasar terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 - Pengolahan Data tahun 2019 - 2022  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**WALI KOTA PAREPARE**

**TTD**

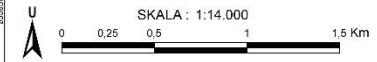
TAUFAN PAWE

LAMPIRAN III.E  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA  
 PAREPARE

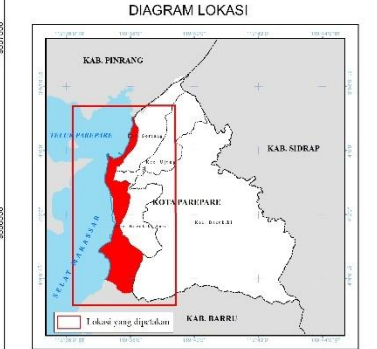


LAMPIRAN III.E  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR ... TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

**PETA RENCANA  
 JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

Ibu kota Pemerintahan  
 Ibu kota Kabupaten/Kota  
 Ibu kota Kecamatan  
 Ibu kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Kelurahan

Batas Perencanaan  
 Batas WP  
 Batas 500m  
 Batas Blok

Perairan  
 Garis Pantai  
 Garis Pantai Rencana

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

Rencana Jaringan Sumber Daya Air  
 Jaringan Pengendalian Banjir

Penjelasan Kode Lokasi  
 I A.1  
 I B.1  
 I C.1  
 I D.1  
 I E.1

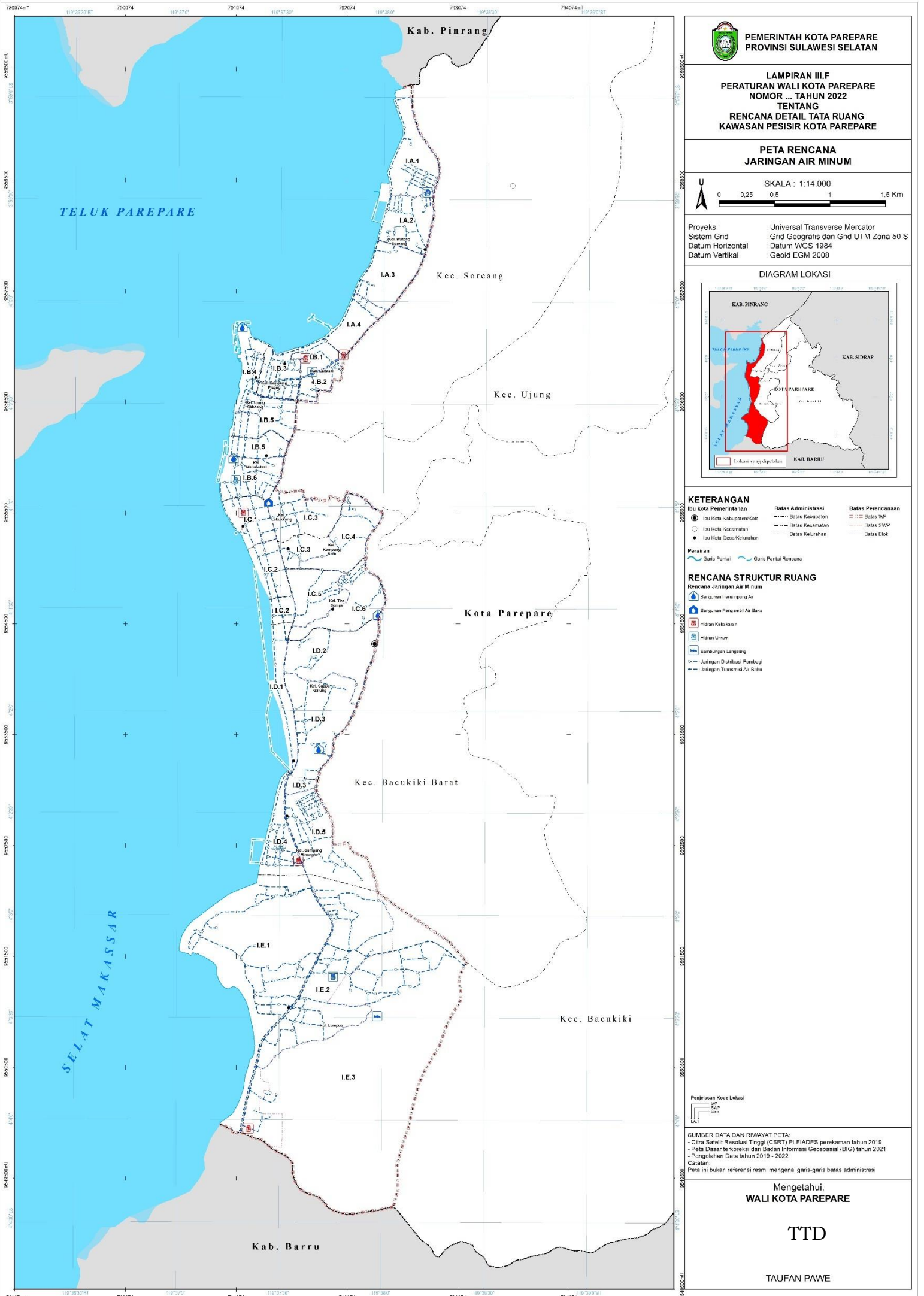
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019  
 - Peta Dasar terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 - Pengolahan Data tahun 2019 - 2022  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**WALI KOTA PAREPARE**

**TTD**

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN III.F  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

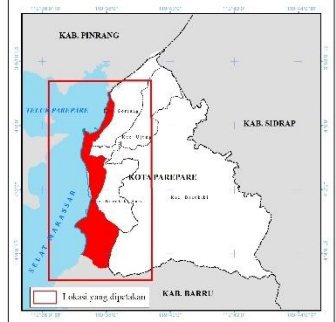
LAMPIRAN III.F  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR ... TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

**PETA RENCANA**  
**JARINGAN AIR MINUM**

U  
 SKALA : 1:14.000  
 0 0.25 0.5 1 1.5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN**

|                           |                        |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ● Ibu Kota Pemerintahan   | --- Batas Administrasi | --- Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan      | --- Batas Kabupaten    | --- Batas WP          |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | --- Batas Kecamatan    | --- Batas SWP         |
|                           | --- Batas Kelurahan    | --- Batas Blok        |

Perairan  
 ~~~~~ Garis Pantai    ~~~~~ Garis Pantai Rencana

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum

- Bangunan Menampung Air
- Bangunan Pengolahan Air Baku
- Jaringan Distribusi Pembagi
- Jaringan Transmisi Air Baku

Penjelasan Kode Lokasi

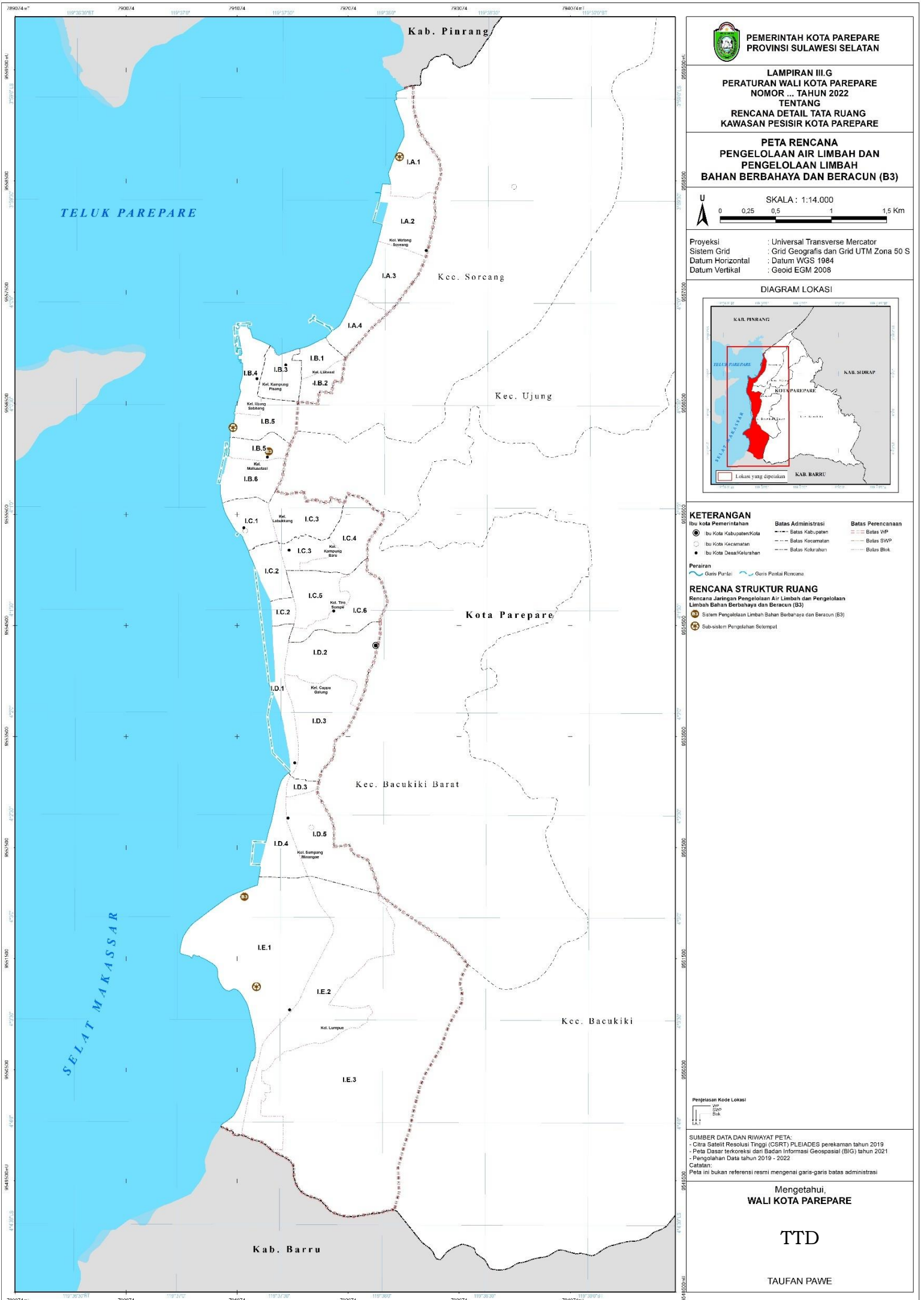
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019
 - Peta Dasar terkecil dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 - Pengolahan Data tahun 2019 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA PAREPARE

TTD

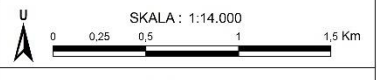
TAUFAN PAWE

LAMPIRAN III.G
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



**LAMPIRAN III.G
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE**

**PETA RENCANA
 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN
 Ibu kota Pemerintahan
 Ibu kota Kabupaten/Kota
 Ibu kota Kecamatan
 Ibu kota Desa/Kelurahan
 Batas Administrasi
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan
 Batas Perencanaan
 Batas WP
 Batas SWP
 Batas Blok

Perairan
 Garis Pantai
 Garis Pantai Rencana

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 Sub-sistem Pengalihan Selampit

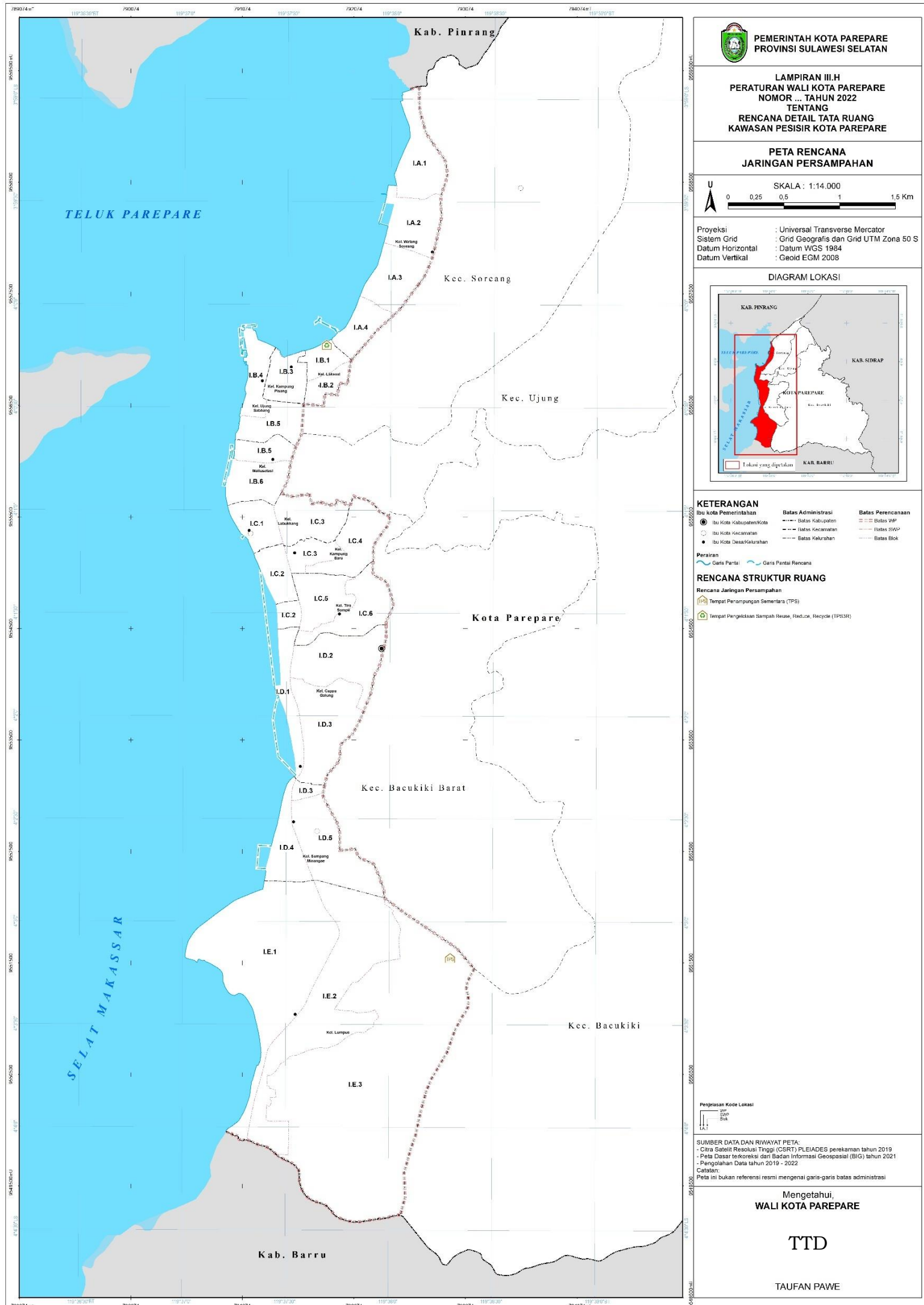
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019
 Peta Dasar terkorrektasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 Pengalihan Data tahun 2019 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA PAREPARE

TTD

 TAUFAN PAWE

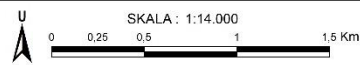
LAMPIRAN III.H
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

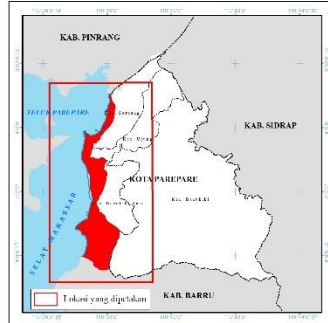
LAMPIRAN III.H
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

PETA RENCANA
 JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Balas Administrasi
- Balas Kabupaten
- Balas Kecamatan
- Balas Kelurahan
- Balas Perencanaan
- Balas VAP
- Balas SWP
- Balas Blok

Perairan
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ~~~~~ Garis Pantai Rencana

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Rencana Jaringan Persampahan
- 🗑️ Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - ♻️ Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPRSR)

Penjelasan Kode Lokasi

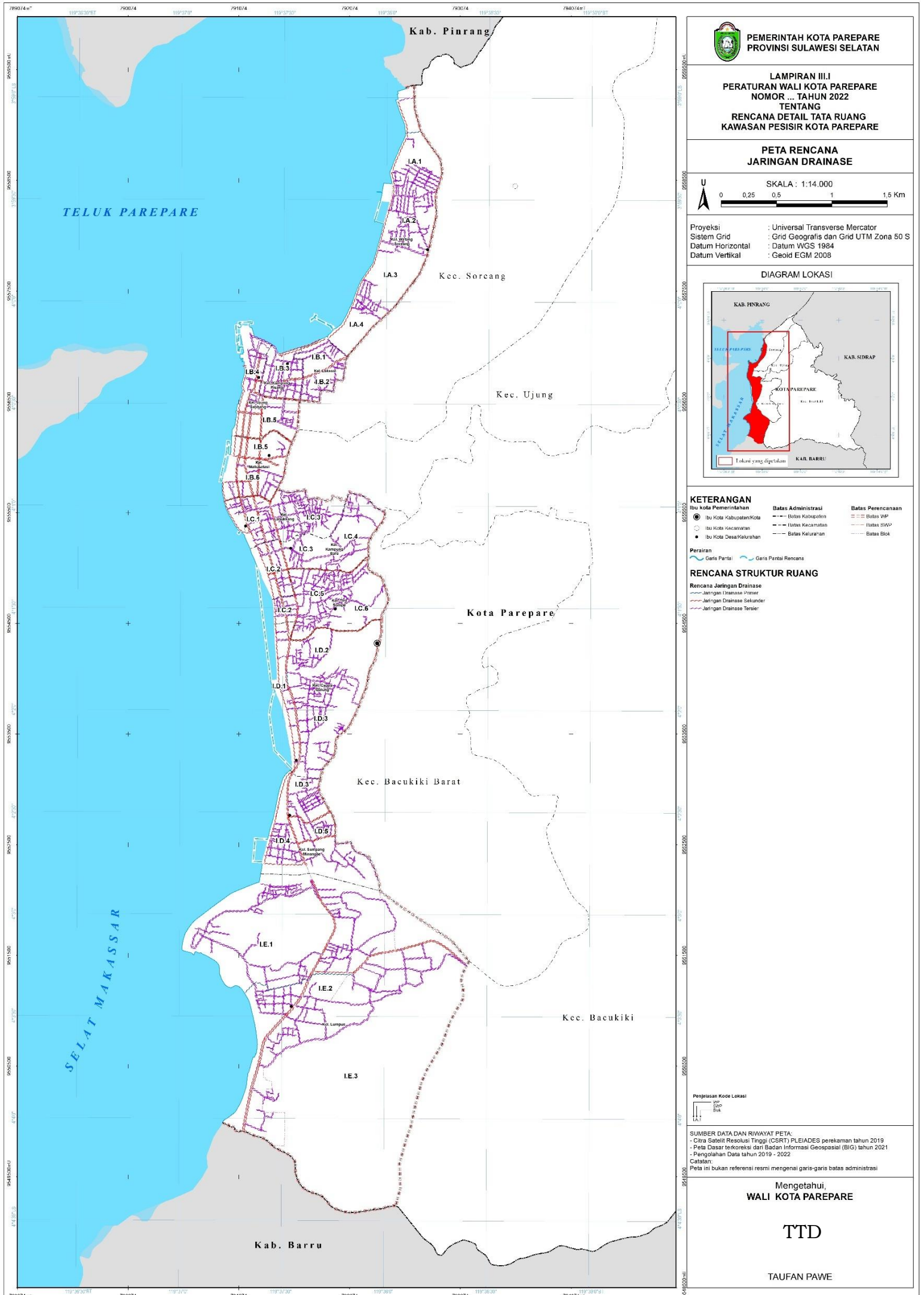
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perelaman tahun 2019
 - Peta Dasar teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 - Pengolahan Data tahun 2019 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
 WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE

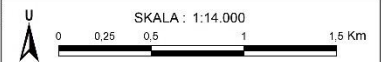
LAMPIRAN III.I
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

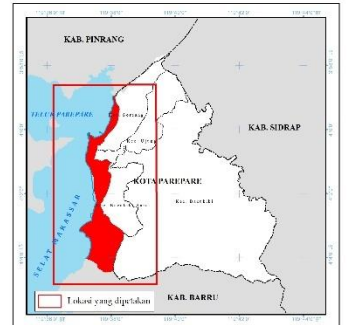
LAMPIRAN III.I
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

PETA RENCANA
 JARINGAN DRAINASE



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| ● Ibu Kota Pemerintahan | — Batas Administrasi | □ Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan | □ Batas VMP |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | — Batas Kecamatan | □ Batas SWP |
| | — Batas Kelurahan | □ Batas Blok |

Perairan
 — Garis Pantai
 — Garis Pantai Rencana

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Rencana Jaringan Drainase
 — Jaringan Drainase Primer
 — Jaringan Drainase Sekunder
 — Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

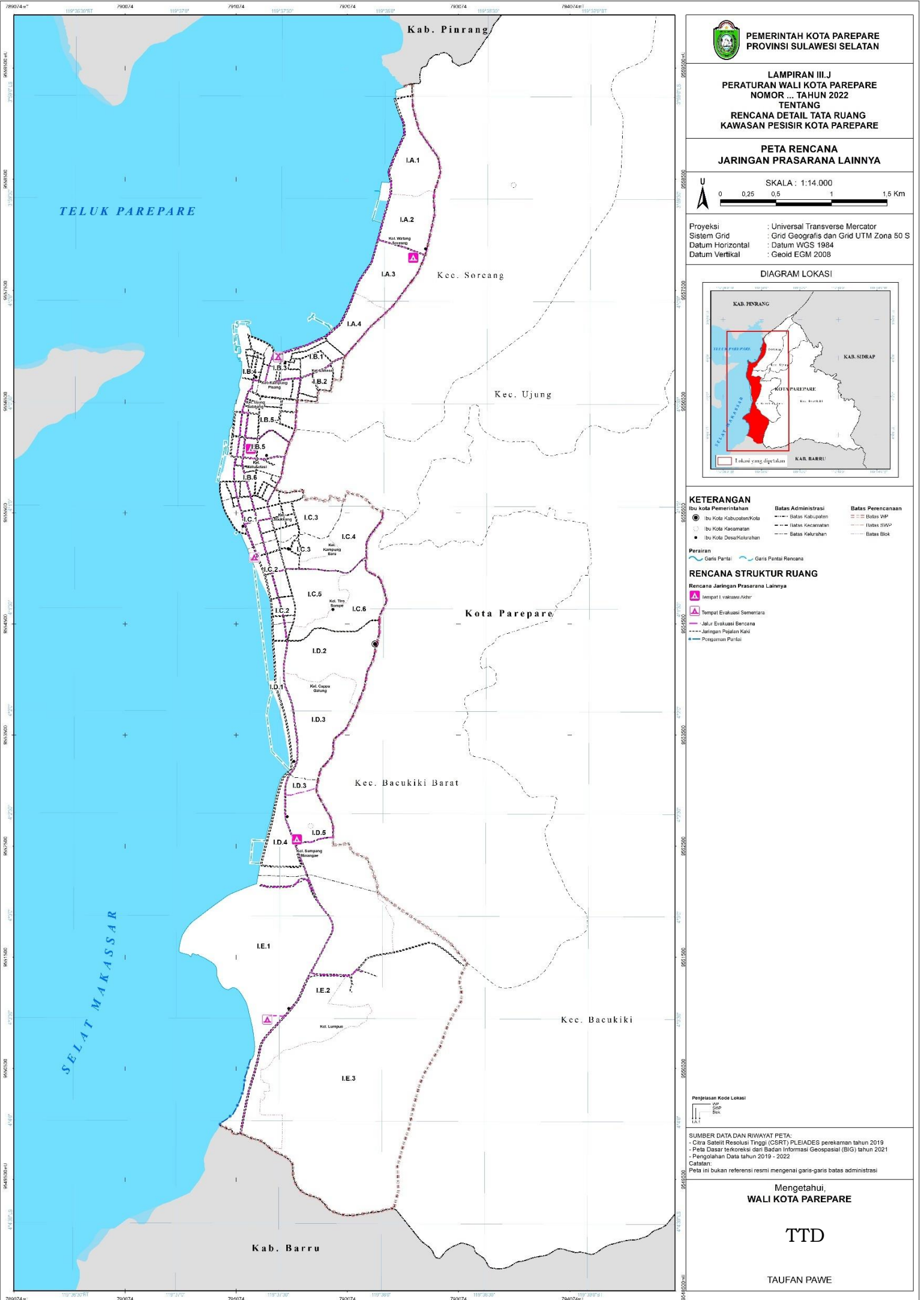
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perelaman tahun 2019
 - Peta Dasar terkorrektasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 - Pengolahan Data tahun 2019 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
 WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE

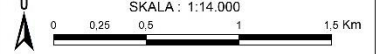
LAMPIRAN III.J
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

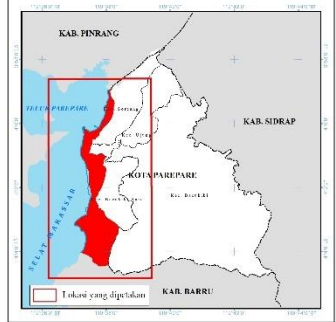
LAMPIRAN III.J
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

PETA RENCANA
JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| ● Ibu Kota Pemerintahan | --- Batas Kabupaten | --- Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | --- Batas Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- ▲ Tempat Evakuasi Air
- ▲ Tempat Evakuasi Sementara
- ▲ Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Jalan Kaki
- Jaringan Pantai

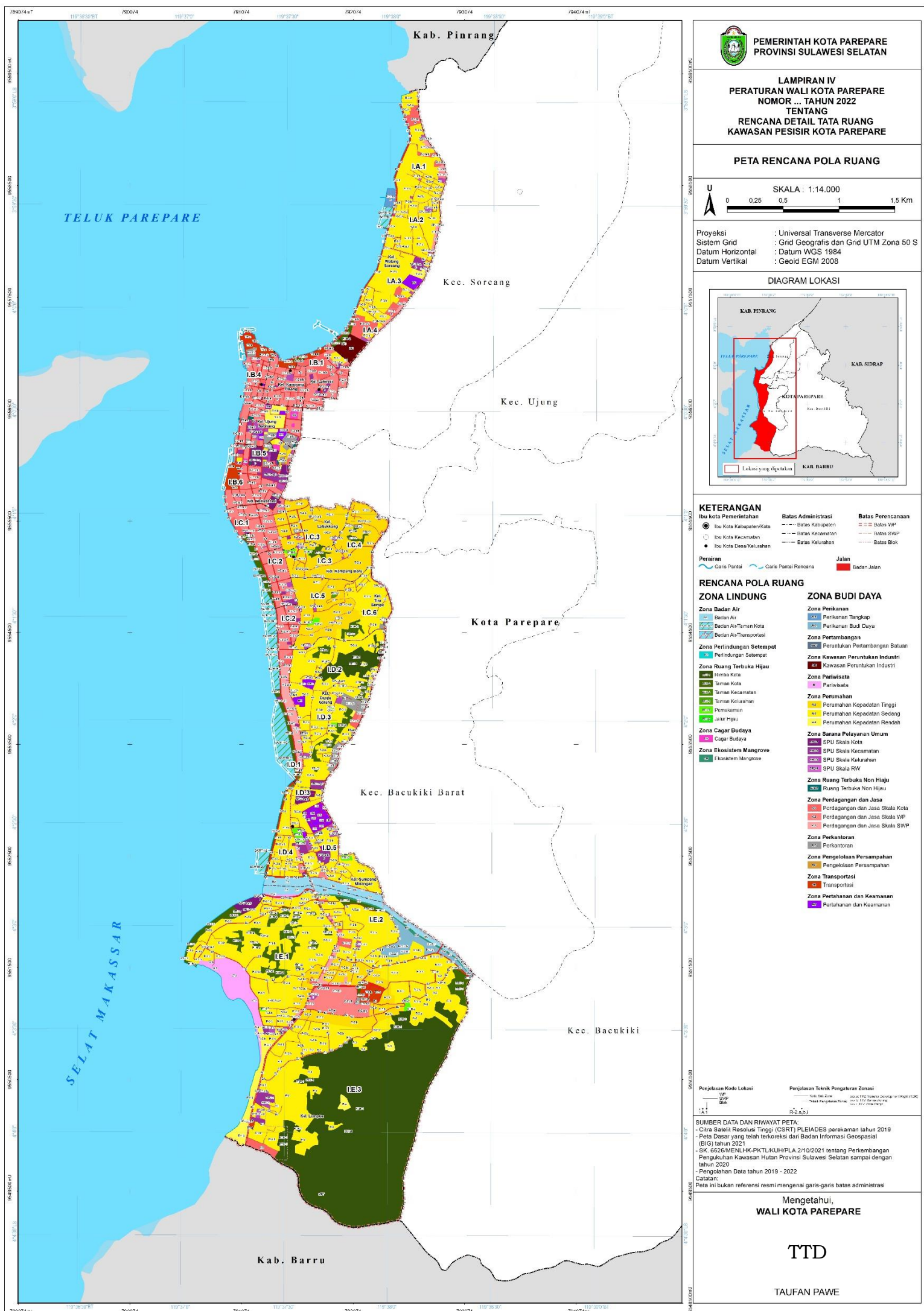
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019
 - Peta Dasar teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 - Pengolahan Data tahun 2019 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE**

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:14.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ● Ibu Kota Pemerintahan | --- Batas Administrasi | --- Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kabupaten | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Kelurahan | --- Batas Blok |

Perairan
 --- Garis Pantai
 --- Garis Pantai Rencana

Jalan
 --- Jalan

RENCANA POLA RUANG

| | |
|---|---|
| ZONA LINDUNG | ZONA BUDI DAYA |
| <ul style="list-style-type: none"> Badan Air Badan Air/Taman Kota Badan Air/Transportasi | <ul style="list-style-type: none"> Perikanan Perikanan Tangkap Perikanan Budi Daya |
| <ul style="list-style-type: none"> Perindungan Setempat | <ul style="list-style-type: none"> Zona Pertambangan Peruntukan Pertambangan Batuan |
| <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Himba Kota Taman Kota Taman Kecamatan Taman Kelurahan Pemukaman Luar Hijau | <ul style="list-style-type: none"> Zona Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri |
| <ul style="list-style-type: none"> Zona Cagar Budaya Cagar Budaya | <ul style="list-style-type: none"> Zona Pariwisata Pariwisata |
| <ul style="list-style-type: none"> Zona Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove | <ul style="list-style-type: none"> Zona Perumahan Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan Kepadatan Sedang Perumahan Kepadatan Rendah |
| | <ul style="list-style-type: none"> Zona Sarana Pelayanan Umum SPU Skala Kota SPU Skala Kecamatan SPU Skala Kelurahan SPU Skala RW |
| | <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Non Hijau Ruang Terbuka Non Hijau |
| | <ul style="list-style-type: none"> Zona Perdagangan dan Jasa Perdagangan dan Jasa Skala Kota Perdagangan dan Jasa Skala WP Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| | <ul style="list-style-type: none"> Zona Perkantoran Perkantoran |
| | <ul style="list-style-type: none"> Zona Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah |
| | <ul style="list-style-type: none"> Zona Transportasi Transportasi |
| | <ul style="list-style-type: none"> Zona Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan Keamanan |

Penjelasan Kode Lokasi

| | |
|-----|---------------------------|
| WP | Perumahan |
| SWP | Sarana Umum |
| BWP | Batas Wilayah Perencanaan |

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

| | |
|-------|-------------------------|
| R2 | Ruang Terbuka Non Hijau |
| R2.01 | Ruang Terbuka Non Hijau |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- SK. 6226/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2020
- Pengalihan Data tahun 2019 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | Perwujudan Rencana Struktur Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | | | | | | | | | | | | | | Perwujudan Rencana pengembangan pusat pelayanan | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | | | | | | | | | | | | | | PPK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen RTBL | SWP I.B Blok I.B.6 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/ Swasta sumber lain yang sah. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, & Pertanahan Dinas PUPR | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk penataan Kawasan Perdagangan dan jasa | SWP I.B Blok I.B.6 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/ Swasta sumber lain yang sah. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, & Pertanahan Dinas PUPR | | | | | | | | | | | |
| 3 | Program pengembangan permukiman untuk Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman yang berada di wilayah perencanaan RDTR | SWP I.B Blok I.B.6 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/ Swasta sumber lain yang sah. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, & Pertanahan Dinas PUPR | | | | | | | | | | | |
| A.1.2 | | | | | | | | | | | | | | SPPK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen RTBL | SWP I.E Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/ Swasta sumber lain yang sah. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, & Pertanahan Dinas PUPR | | | | | | | | | | | |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana | |
|---------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|-------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | | |
| A.1.3 | PPL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.3.1 | PL Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen RTBL | SWP I.C Blok I.C.1
SWP I.D Blok I.D.5 | | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/ Swasta sumber lain yang sah. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, & Pertanahan Dinas PUPR |
| A.1.3.2 | PL Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen RTBL | SWP I.A Blok I.A.1
SWP I.B Blok I.B.4
SWP I.C Blok I.C.2,
Blok I.C.6
SWP I.D Blok I.D.1
SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/ Swasta sumber lain yang sah. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, & Pertanahan Dinas PUPR |
| A.2 | Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | Jalan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan jaringan jalan arteri primer, meliputi: | | | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |
| | a. ruas jalan Andi Arsad | SWP I.A | | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |
| | b. ruas jalan Lasinrang | SWP I.B | | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |
| | c. ruas jalan Sultan Hasanuddin | SWP I.B | | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |
| | d. ruas jalan Karaeng Burane | SWP I.B | | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |
| | e. ruas jalan Baumassepe | SWP I.B
SWP I.C | | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|-----|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | | SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. ruas jalan Lingkar Parepare | SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |
| | g. ruas jalan Baso Daeng Patompo | SWP I.B | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |
| 2 | Pengembangan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR |
| 3 | Pengembangan pemeliharaan jalan lokal sekunder | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBD Kota, | Dinas PUPR |
| 4 | Pemeliharaan penerangan jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi/Kota | Dinas PUTR Provinsi
Dinas PUPR |
| 5 | Peningkatan dan pemeliharaan prasarana pendukung | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBD Kota | Dinas PUPR |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|--------------------------|--|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|--|-------------------|--|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| A.2.2 Jalan Tol | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pematangan lahan trase jalan tol Maros-Parepare | SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBN | Kemen PUPR |
| A.2.3 Terminal Penumpang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A | SWP I.E Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBN/Swasta | Kementerian Perhubungan |
| 2. | Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C | SWP I.B Blok I.B.1,
Blok I.B.6
SWP I.E Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota | Dinas Perhubungan |
| A.2.4 Terminal Barang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan terminal barang | SWP I.B Blok I.B.3
Blok I.B.4 | | | | | | | | | | | | | APBN/Swasta | Kementerian Perhubungan |
| A.2.5 Jembatan timbang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan jembatan timbang | SWP I.E Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota, Swasta | Dinas Perhubungan |
| A.2.6 Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan jembatan | SWP I.A Blok I.A.1
SWP I.D Blok I.D.4,
Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1
Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBN/ APBD Kota | Kementerian Perhubungan,
Dinas PUPR |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---|--|-------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|--|-------------|-------------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2042 | | | | | |
| A.2.7 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Studi Kelayakan (FS) dan rencana induk Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota Makassar - Parepare | SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |
| 2 | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antarkota Makassar - Parepare | SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |
| A.2.8 Pelabuhan Pengumpul | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul | SWP I.BBlok I.B.4, Blok I.B.6 | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |
| A.2.9 Terminal Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan terminal khusus | SWP I.A Blok I.A.4 | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |
| A.2.10 Pelabuhan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan pangkalan pendaratan ikan | SWP I.A Blok I.A.2 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota | Dinas Perhubungan |
| 2 | Peningkatan status pangkalan pendaratan ikan ke pelabuhan perikanan nusantara | SWP I.A Blok I.A.2 | | | | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana | |
|---------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|-------------|--------------------------|------------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | | |
| A.3 | Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | Rencana Jaringan Energi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1.1 | Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen | SWP I.E | | | | | | | | | | | | | | APBN | PLN/BUMN |
| 2 | Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen | SWP I.E | | | | | | | | | | | | | | APBN | PLN/BUMN |
| A.3.1.2 | Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) | SWP I.E Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | | APBN/Swasta
APBD Kota | PLN/BUMN
Dinas PUPR |
| A.3.1.3 | Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) | SWP I.E | | | | | | | | | | | | | | APBN | PLN/BUMN |
| A.3.1.4 | Jaringan distribusi tenaga listrik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan saluran udara tegangan menengah (SUTM) | SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D | | | | | | | | | | | | | | APBN/Swasta
APBD Kota | PLN/BUMN
Dinas PUPR |
| 2 | Pengembangan dan pemeliharaan saluran udara tegangan rendah (SUTR) | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | | APBN/Swasta
APBD Kota | PLN/BUMN
Dinas PUPR |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|---|---|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | |
| A.3.1.5 Gardu listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan gardu distribusi | SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | APBN/Swasta
APBD Kota | PLN/BUMN
Dinas PUPR |
| A.3.2 Rencana Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.2.1 Jaringan Tetap | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan serat optik | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | APBN/sumber pembiayaan lain yang sah | Telkom, BUMN, Swasta |
| 2 | Pengembangan dan pemeliharaan sentral telepon otomatis (STO) | SWP I.B Blok I.B.5 | | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kota/swasta/sumber lain yang sah | PT. Telkom/ Swasta Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3 | Pengembangan dan pemeliharaan rumah kabel | SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 | | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kota/swasta/sumber | PT. Telkom/ Swasta Dinas Komunikasi dan |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | | SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3
SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5
SWP I.D Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | r lain yang sah | Informatika | |
| A.3.2.2 | Jaringan Bergerak Seluler | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan dan pengembangan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) | SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3
SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, I, Blok I.B.5, Blok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2
SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | APBN/sumber pembiayaan lain yang sah | Telkom BUMN Swasta | |
| 2 | Peningkatan kapasitas dan kualitas menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) | SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3
SWP I.B Blok I.B.1, | | | | | | | | | | | | APBN/sumber pembiayaan lain yang sah | Telkom BUMN Swasta | |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | | Blok I.B.3, Blok I.B.4, I, Blok I.B.5, Blok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2
SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.3 | Rencana Jaringan Sumber Daya Air | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan dan pengembangan jaringan pengendalian banjir | SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR, PDAM, Lingkungan Hidup |
| A.3.4 | Rencana Jaringan Air Minum | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.4.1 | Unit Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan bangunan pengambil air baku | SWP I.C Blok I.C.3 | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup |
| 2 | Rehabilitasi bangunan pengambil air baku | SWP I.C Blok I.C.3 | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup |
| 3 | Pengendalian pemanfaatan air tanah pada bangunan pengambil air baku | SWP I.C Blok I.C.3 | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|------------------------------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---|---|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| 4 | Jaringan transmisi air baku | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov.
/ APBD Kota,
Swasta | Dinas PUPR, PDAM,
Bappeda, Lingkungan
Hidup |
| A.3.4.2 Unit Produksi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan bangunan penampung air | SWP I.B Blok I.B.4,
Blok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.6
SWP I.D Blok I.D.3 | | | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kota | Kemen PUPR/
PDAM
Dinas PUPR |
| A.3.4.3 Unit Distribusi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi pembagi | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kota | Kemen PUPR/
PDAM
Dinas PUPR |
| A.3.4.4 Unit Pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.4.4.1 Sambungan Langsung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan sambungan langsung | SWP I.E Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kota | Kemen PUPR/
PDAM
Dinas PUPR |
| A.3.4.4.2 Hidran Umum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan hidran umum | SWP I.A Blok I.A.2 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota | PDAM |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------------|--|--|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | | SWP I.B Blok I.B.1,
Blok I.B.6
SWP I.D Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | | | Dinas PUPR |
| A.3.4.4.
3 | Hidran Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaanhidran kebakaran | SWP I.A Blok I.A.4
SWP I.B Blok I.B.1
SWP I.C Blok I.C.1
SWP I.D Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota | PDAM
Dinas PUPR |
| A.3.5 | Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.1 | Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan sub-sistem pengolahan setempat | SWP I.A Blok I.A.1
SWP I.B Blok I.B.5
SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Kota/
swasta/sumber lain
yang sah. | Kemen PU,
Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup |
| A.3.5.2 | Sistem pengelolaan limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 | SWP I.B Blok I.B.5
SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Kota/
swasta/sumber lain
yang sah. | Kemen PU,
Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup |
| A.3.6 | Rencana Jaringan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.6.1 | TPS3R | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Studi kelayakan dan DED | SWP I.B Blok I.B.1 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR, Dinas |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|--|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---|---|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | TPS3R | | | | | | | | | | | | | | | Lingkungan Hidup |
| 2 | Pengembangan TPS3R | SWP I.B Blok I.B.1 | | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/
APBD Kota, Swasta | Dinas Lingkungan
Hidup |
| A.3.6.2 | TPS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Studi kelayakan dan DED pengembangan TPS | SWP I.E Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/
APBD Kota, Swasta | Dinas Lingkungan
Hidup |
| 2 | Pengembangan TPS | SWP I.E Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/
APBD Kota, Swasta | Dinas Lingkungan
Hidup |
| A.3.7 | Rencana Jaringan Drainase | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.7.1 | Jaringan drainase primer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer | SWP I.A
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/
APBD Kota | Dinas PUPR, Dinas
Lingkungan Hidup |
| 2 | Penertiban prasarana lainnya yang menghambat fungsi jaringan drainase primer | SWP I.A
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/
APBD Kota | Dinas PUPR, Dinas
Lingkungan Hidup |
| A.3.7.2 | Jaringan drainase sekunder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan jaringan drainase sekunder | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/
swasta/sumber lain
yang sah. | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup |
| A.3.7.3 | Jaringan drainase tersier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan dan | SWP I.A | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/ | Dinas PUPR |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | pemeliharaan jaringan drainase tersier berupa gorong-gorong | SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | swasta/sumber lain yang sah. | Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan | |
| A.3.8 | Rencana Jaringan Prasarana Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.8.1 | Jalur evakuasi bencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan jalur evakuasi bencana | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/
APBD Kota, Swasta | BPBD
Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD | |
| 2 | Pengembangan prasarana penunjang jalur evakuasi bencana | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/
APBD Kota, Swasta | BPBD
Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD | |
| A.3.8.2 | Tempat evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan pembangunan tempat evakuasi sementara | SWP I.B Blok I.B.3,
SWP I.C Blok I.C.2
SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/Kota/swasta/
sumber lain yang sah. | BPBD
Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| 2 | Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi akhir | SWP I.A Blok I.A.3,
SWP I.B Blok I.B.5
SWP I.D Blok I.D.5 | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/Kota/swasta
sumber lain yang | Kemen PUPR, BPBD
Dinas PUPR/
Dinas Pemadam | |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana | |
|----------------------------------|---|--|-------------------|------|------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-------------|--|--|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2042 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | sah. | Kebakaran dan Penyelamatan | |
| A.3.8.3 Jaringan pejalan kaki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan jaringan pejalan kaki | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kota | Dinas PUPR |
| 2 | Pembangunan prasarana penunjang jaringan pejalan kaki | SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D
SWP I.E | | | | | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kota | Dinas PUPR |
| A.3.8.4 Pengaman pantai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan pengaman pantai | SWP I.E | | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/sumber lain yang sah. | BPBD
Dinas PUPR /
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| B Perwujudan Rencana Pola Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 Perwujudan Zona Lindung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 Zona Perlindungan Setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sosialisasi dan pengendalian Zona Perlindungan Setempat | SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 | | | | | | | | | | | | | | APBD Prov. / APBD Kota, Swasta | Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|--|--|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------------|--|--------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | | SWP I.BBlok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1,
Blok I.C.2
SWP I.DBlok I.D.1,
Blok I.D.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyediaan prasarana pendukung pada Zona Perlindungan Setempat | SWP I.A Blok I.A.1,
Blok I.A.2, Blok I.A.3,
Blok I.A.4
SWP I.BBlok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1,
Blok I.C.2
SWP I.DBlok I.D.1,
Blok I.D.4 | | | | | | | | | | | | APBD Prov. / APBD Kota, Swasta | Dinas Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup, Swasta | |
| 3 | Pengembangan dan Pemeliharaan Zona Perlindungan Setempat | SWP I.A Blok I.A.1,
Blok I.A.2, Blok I.A.3,
Blok I.A.4
SWP I.BBlok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1,
Blok I.C.2
SWP I.DBlok I.D.1,
Blok I.D.4 | | | | | | | | | | | | APBD Prov. / APBD Kota, Swasta | Dinas Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup, Swasta | |
| B.1.2 | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2.1 | Sub-Zona Rimba Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sosialisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona | SWP I.DBlok I.D.2,
SWP I.EBlok I.E.2, | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan | |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|--|---|-------------------|------|------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2042 | | | | | |
| | Rimba Kota | Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | sah | Hidup, |
| 2 | Pembebasan lahan yang telah ditetapkan sebagai Sub-Zona Rimba Kota | SWP I.D Blok I.D.2, SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/sah sumber lain yang | Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup, |
| 3 | Pengembangan dan pemeliharaan Sub-Zona Rimba Kota | SWP I.D Blok I.D.2, SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/sah sumber lain yang | Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup, |
| B.1.2.2 | Sub-Zona Taman Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Sub-Zona Taman Kota pada area reklamasi | SWP I.A Blok I.A.2
SWP I.C Blok I.C.2
SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.4 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/sah sumber lain yang | Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup, |
| 2 | Pembebasan lahan yang telah ditetapkan sebagai Sub-Zona Taman Kota | SWP I.A Blok I.A.4
SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6
SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.1 Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD Prov./ APBD Kota, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Bappeda, Swasta |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| 3 | Penataan dan Pemeliharaan Sub-Zona Taman Kota | SWP I.A Blok I.A.4;
SWP I.B Blok I.B.1,
Blok I.B.3;
SWP I.C Blok I.C.1,
Blok I.C.2, Blok I.C.3,
Blok I.C.4, Blok I.C.6;
SWP I.D Blok I.D.1,
Blok I.D.2, Blok I.D.3,
Blok I.D.4;
SWP I.E Blok I.E.1;
Blok I.E.2, Blok I.E.3. | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov.
/ APBD Kota,
Swasta | Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas PUPR,
Dinas Perkim,
Bappeda, Swasta | |
| B.1.2.3 | Sub-Zona Taman Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembebasan lahan yang telah ditetapkan sebagai Sub-Zona Taman Kecamatan | SWP I.B Blok I.B.5
SWP I.D Blok I.D.1,
Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup, |
| 2 | Penataan dan pemeliharaan Sub-Zona Taman Kecamatan | SWP I.B Blok I.B.5
SWP I.D Blok I.D.1,
Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup, | |
| B.1.2.4 | Sub-Zona Taman Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembebasan lahan yang telah ditetapkan sebagai Sub-Zona Taman Kelurahan | SWP I.B Blok I.B.4,
Blok I.B.5
SWP I.C Blok I.C.3,
Blok I.C.5, Blok I.C.6 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup, |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|------------------------------|--|--|-------------------|------|------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2042 | | | | | |
| | | SWP I.D Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.1,
Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penataan dan pemeliharaan Sub-Zona Taman Kelurahan | SWP I.B Blok I.B.4,
Blok I.B.5
SWP I.C Blok I.C.3
Blok I.C.5, Blok I.C.6
SWP I.D Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.1,
Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup, | |
| B.1.2.5 Sub-Zona Pemakaman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan penataan Sub-Zona Pemakaman | SWP I.C Blok I.C.3,
Blok I.C.5
SWP I.D Blok I.D.3,
Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1,
Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup, | |
| B.1.2.6 Sub-Zona Jalur Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan penataan Sub-Zona Jalur Hijau | SWP I.D Blok I.D.2
SWP I.E Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup, | |
| B.1.3 Zona Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penataan dan pengembangan Zona Cagar Budaya | SWP I.B Blok I.B.4
Blok I.B.5 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas PUPR | |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|-------|--|---|-------------------|------|------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|---|---|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2042 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pemeliharaan Zona Cagar Budaya | SWP I.B Blok I.B.4
Blok I.B.5 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang sah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas PUPR |
| B.1.4 | Zona Ekosistem <i>Mangrove</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sosialisasi pemanfaatan Zona Ekosistem <i>Mangrove</i> | SWP I.E Blok I.E.2,
Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup, |
| 2 | Pelestarian Zona Ekosistem <i>Mangrove</i> | SWP I.E Blok I.E.2,
Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup, |
| B.1.5 | Zona Badan Air | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Zona Badan Air | SWP I.A Blok I.A.1,
Blok I.A.2
SWP I.C Blok I.C.2
SWP I.D Blok I.D.1,
Blok I.D.4, Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1,
Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup, |
| 2 | Perwujudan Zona Badan Air sebagai area reklamasi | SWP I.A Blok I.A.2
SWP I.C Blok I.C.2
SWP I.D Blok I.D.1,
Blok I.D.4 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup, |
| B.2 | Perwujudan Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---|--|--|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| B.2.1 Zona Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1.1 Sub-Zona Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan hasil perikanan pada Sub-Zona Perikanan Tangkap | SWP I.A Blok I.A.2 | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBN Kota. | Dinas PKP |
| B.2.1.2 Sub-Zona Perikanan Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan hasil perikanan pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya | SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBD Kota, Swasta | Dinas PKP |
| B.2.2 Zona Pertambangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.1 Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan | SWP I.E Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBD Kota/ Swasta | BUMN/Swasta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR |
| 2 | Perwujudan Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan | SWP I.E Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBD Kota/ Swasta | BUMN/Swasta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR |
| B.2.3 Zona Kawasan Peruntukan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan kajian lingkungan dan masterplan Zona Kawasan Peruntukan Industri | SWP I.A Blok I.A.4
SWP I.E Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBD Kota/ Swasta | Bappeda, Perindag, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | Penataan dan pengembangan Zona Kawasan Peruntukan | SWP I.A Blok I.A.4
SWP I.E Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | | APBN / APBD Prov. / APBD | Bappeda, Perindag, Dinas PUPR, Dinas |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2042 | | | | |
| | Industri | | | | | | | | | | | | | Kota/ Swasta | Lingkungan Hidup |
| B.2.4 | Zona Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan keterpaduan manajemen pengelolaan Zona Pariwisata | SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/sumber lain yang sah | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas PUPR |
| 2 | Peningkatan dan pengembangan Zona Pariwisata sebagai daya tarik objek pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan | SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/sumber lain yang sah | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas PUPR |
| 3 | Pengembangan dan pemasaran objek wisata | SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/sumber lain yang sah | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas PUPR |
| 4 | Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Zona Pariwisata | SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/sumber lain yang sah | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas PUPR |
| B.2.5 | Zona Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.5.1 | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangandan penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi | SWP I.BBlok I.B.5
SWP I.C Blok I.C.3,
Blok I.C.4, Blok I.C.5,
Blok I.C.6 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/sumber lain yang sah | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas PUPR |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|--|--|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---|--|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | | SWP I.E Blok I.E.1,
Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.5.2 | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangandan penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | SWP I.A Blok I.A.1,
Blok I.A.2, Blok I.A.3,
Blok I.A.4
SWP I.B Blok I.B.1,
Blok I.B.5, Blok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.6
SWP I.D Blok I.D.2,
Blok I.D.3, Blok I.D.4,
Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1,
Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD
Prov/Kota/swasta/s
umber lain yang sah | Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas PUPR |
| B.2.5.3 | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangandan penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | SWP I.A Blok I.A.3
SWP I.B Blok I.B.5
SWP I.D Blok I.D.3
Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1
Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD
Prov/Kota/swasta/s
umber lain yang sah | Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas PUPR |
| B.2.6 | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.6.1 | Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung | SWP I.B Blok I.B.5
Blok I.B.6 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang | Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana | |
|---------|--|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|--|--|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | |
| | pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota | SWP I.C Blok I.C.3
Blok I.C.6
SWP I.D Blok I.D.3
SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | sah | dan Pertanahan Dinas PUPR |
| B.2.6.2 | Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan | SWP I.A Blok I.A.2
Blok I.A.3
SWP I.B Blok I.B.1,
Blok I.B.2, Blok I.B.3,
Blok I.B.5, Blok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1,
Blok I.C.2, Blok I.C.3
SWP I.D Blok I.D.1,
Blok I.D.3, Blok I.D.4,
Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1
Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas PUPR |
| B.2.6.3 | Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan | SWP I.A Blok I.A.1,
Blok I.A.2, Blok I.A.3,
Blok I.A.4
SWP I.B Blok I.B.2,
Blok I.B.3, Blok I.B.4,
Blok I.B.5, Blok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1, | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas PUPR |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|---|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | | Blok I.C.2, Blok I.C.3,
Blok I.C.4, Blok I.C.5,
Blok I.C.6
SWP I.D Blok I.D.1,
Blok I.D.2, Blok I.D.3,
Blok I.D.4, Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1,
Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.6.4 | Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW | SWP I.A Blok I.A.1,
Blok I.A.2, Blok I.A.4
SWP I.B Blok I.B.2,
Blok I.B.3,
SWP I.C Blok I.C.4
SWP I.D Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.1 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas PUPR |
| B.2.7 | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan penataan sarana dan prasarana pendukung pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau | SWP I.B Blok I.B.4
Blok I.B.5 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas PUPR
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata |
| B.2.8 | Zona Perdagangan dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|--|--|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| B.2.8.1 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan penataan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota | SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4
SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4
SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.1 Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Perdagangan
Dinas PUPR | |
| B.2.8.2 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan penataan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP | SWP I.A Blok I.A.1
SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3
SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1, | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Perdagangan
Dinas PUPR | |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana |
|---------|---|--|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|----------------------------------|--------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| | | Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.8.3 | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan penataan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP | SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4
SWP I.B Blok I.B.5
SWP I.D Blok I.D.1 Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.1 Blok I.E.2 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Perdagangan
Dinas PUPR | |
| B.2.9 | Zona Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan dan pengembangan pada Zona Perkantoran | SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4
SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6
SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5
SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Tenaga Kerja
Dinas PUPR | |
| B.2.10 | Zona Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program | Lokasi | Waktu pelaksanaan | | | | | | | | | | Sumber dana | Instansi pelaksana | | |
|--------|---|---|-------------------|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | PJM 1 | | | PJM 2 | | PJM 3 | PJM 4 | PJM 5 | | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-
2029 | 2030-
2034 | 2035-
2039 | 2040-
2042 | | | | | |
| 1 | Pengembangan Zona Pengelolaan Persampahan | SWP I.B Blok I.B.1 | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas PUPR
Dinas Lingkungan
Hidup | |
| B.2.11 | Zona Transportasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Zona Transportasi | SWP I.A Blok I.A.2
SWP I.B Blok I.B.1,
Blok I.B.3, Blok I.B.4,
Blok I.B.6
SWP I.D Blok I.D.4
SWP I.E Blok I.E.2,
Blok I.E.3 | | | | | | | | | | | | | APBD Kota/swasta/
sumber lain yang
sah | Dinas Tenaga Kerja
Dinas PUPR |
| B.2.12 | Zona Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan | SWP I.A Blok I.A.3
SWP I.B Blok I.B.4,
Blok I.B.5
SWP I.D Blok I.D.2,
Blok I.D.3, Blok I.D.5 | | | | | | | | | | | | | APBN
APBD Prov/Kota. | KEMENHAN
BAPPEDA
Dinas PUPR |

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Zona Perindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 1 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 813 | 8130 | 81300 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | Aktivitas Pemakaman | 969 | 9691 | 96910 | I | I | I | I | I | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Fasilitas Lapangan | 931 | 9311 | 93114 | I | I | I | I | I | T | I | T | I | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | I | |
| 4 | Taman Rekreasi | 932 | 9321 | 93211 | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | X | X | I | X | B | B | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | B | I | | |
| 5 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | 429 | 4291 | 42911 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 421 | 4210 | 42101 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | Konstruksi Gedung Hunian | 410 | 4101 | 41011 | X | X | X | X | X | X | B | T | X | B | B | B | B | T | I | I | I | I | I | I | I | B | I | I | I | B | X | T | I | I |
| 8 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 410 | 4101 | 41012 | X | X | X | X | X | X | B | T | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | B | T | T | T | I | X | T | I | I |
| 9 | Konstruksi Gedung Lainnya | 410 | 4101 | 41019 | X | X | B | X | X | X | B | T | X | B | B | B | B | I | I | I | I | I | I | I | B | I | I | I | I | X | I | I | I | I |
| 10 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya | 869 | 8690 | | T | X | X | X | X | X | B | T | X | T | T | T | T | T | T | T | T | I | I | I | I | X | T | T | T | T | X | T | I | I |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan | Zona Transportasi |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | | |
| 11 | Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan | 871 | 8710 | 87100 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | X | T | T | T | T | T | I | I | I | T | T | T | I | B | T | T | T | X | X | X | X |
| 12 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 410 | 4101 | 41014 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | T | T | T | T | T | T | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | T | X | T | T | |
| 13 | Rumah/Warung Makan | 561 | 5610 | 56102 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | T | T | T | T | B | T | T | T | I | I | I | I | I | I | I | T | X | T | T | | |
| 14 | Kedai Makanan | 561 | 5610 | 56103 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | T | T | T | T | T | T | T | I | I | I | I | I | I | I | I | T | X | T | T | | |
| 15 | Restoran | 561 | 5610 | 56101 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | T | T | X | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | T | T | | |
| 16 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya | 478 | 4781 | 47899 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | T | T | T | T | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | T | T | | |
| 17 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional) | 471 | 4711 | 47112 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | T | T | X | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | T | T | | |
| 18 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil | 478 | 4781 | | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | T | T | T | T | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | T | T | | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 19 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup | 478 | 4789 | 47891 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | I | X | X | T | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T |
| 20 | Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau | 463 | 4633 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | X | T | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | T | T | |
| 21 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | 471 | 4711 | 47111 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | T | T | |
| 22 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 466 | 4661 | 46638 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | X | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 23 | Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko | 472 | 4721 | | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | T | T | X | X | T | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | T | T |
| 24 | Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | 475 | 4759 | 47599 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | X | T | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | B | X | T | T | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 25 | Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik | 477 | 4772 | 47721 | X | X | X | X | X | X | X | T | X | X | T | T | T | T | T | B | B | B | I | I | I | I | B | I | I | I | T | X | T | T |
| 26 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Manusia | 477 | 4772 | 47725 | X | X | X | X | X | X | X | X | T | X | T | T | X | X | T | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | B | X | T | T |
| 27 | Perdagangan Eceran Pakaian | 477 | 4771 | 47711 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | X | X | I | T | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | T | T | |
| 28 | Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian | 477 | 4779 | 47796 | T | X | X | X | X | X | X | B | T | X | T | T | X | I | X | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | X | T |
| 29 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 477 | 4777 | 47773 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | B | X | T | T |
| 30 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 477 | 4775 | 47751 | X | X | X | X | X | X | X | X | T | X | I | I | X | T | T | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | T | X | T | T |
| 31 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 475 | 4759 | 47597 | X | X | X | X | X | X | X | B | T | X | T | T | X | T | B | I | I | I | T | T | T | T | B | I | I | I | B | X | X | T |
| 32 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 462 | 4620 | 46203 | X | X | X | X | X | X | X | B | T | X | T | T | X | T | B | I | I | I | T | T | T | T | B | I | I | I | B | X | X | T |
| 33 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 476 | 4763 | 47630 | X | X | X | X | X | X | X | B | T | X | T | T | X | T | B | I | I | I | T | T | T | T | B | I | I | I | B | X | X | T |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 34 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 477 | 4773 | 47736 | X | X | X | X | X | X | X | B | T | X | T | T | X | X | T | B | B | B | B | T | T | T | B | I | I | I | X | X | X | X |
| 35 | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) | 823 | 8230 | 82301 | X | X | X | X | X | X | X | T | B | X | T | T | X | X | B | B | B | B | B | T | T | T | T | I | I | I | T | X | X | T |
| 36 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 181 | 1812 | 18120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T | X | X | X | I | I | I | X | X | X | I | I | X | T | T | X | X | X | X |
| 37 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 773 | 7731 | 77311 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | I | I | T | X | I | X |
| 38 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun | 952 | 9522 | 95220 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | X | X | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | X | I | I | I | T | X | X | T |
| 39 | Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor | 454 | 4540 | 45407 | X | X | X | X | X | X | X | B | T | X | T | T | X | X | B | B | B | B | T | T | T | T | X | B | B | B | T | X | T | T |
| 40 | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam | 259 | 2592 | 25920 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | |
| | | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | | |
| 41 | Pendidikan Lainnya Swasta | 854 | 8549 | 85499 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | X | X | X | T | T | T | T | I | I | I | I | T | T | T | T | B | X | X | T | | |
| 42 | Klub Kebugaran/Fitness dan Binaraga | 931 | 9312 | 93127 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | B | B | B | I | I | I | I | I | I | I | I | T | X | X | I | | |
| 43 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | 854 | 8549 | 85495 | X | X | X | X | X | X | X | I | T | X | T | T | X | X | B | B | B | B | B | X | X | X | X | I | I | I | B | X | X | T | |
| 44 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 791 | 7911 | 79111 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | I | X | X | I | | |
| 45 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 562 | 5621 | 56210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | B | B | B | B | B | T | T | T | T | T | I | I | I | B | X | X | T |
| 46 | Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 682 | 6820 | 68200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | B | X | I | T | |
| 47 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 821 | 8211 | 82110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | B | T | T | T | T | T | T | I | I | I | I | X | I | T |
| 48 | Aktivitas Salon Kecantikan | 961 | 9611 | 96112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | I | I | I | I | I | I | I | T | I | I | I | B | X | X | T | | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 49 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 473 | 4730 | 47301 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | X | B | B | B | I | I | I | I | T | I | I | I | B | X | I | T | |
| 50 | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya | 900 | 9009 | 90090 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | X | I | I | I | B | X | I | T | | |
| 51 | Hotel Bintang | 551 | 5511 | 55110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T | T | T | I | I | I | I | X | I | I | I | X | X | X | X | |
| 52 | Hotel Melati | 551 | 5512 | 55120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T | T | T | I | I | I | I | X | I | I | I | X | X | X | X | |
| 53 | Pondok Wisata | 551 | 5513 | 55130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T | T | T | I | I | I | I | X | I | I | I | X | X | I | X | |
| 54 | Vila | 551 | 5519 | 55193 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T | T | T | I | I | I | I | X | I | I | I | X | X | I | X | |
| 55 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 851 | 8513 | 85134 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | X | X | I | I | I | X | X | X | X | I | X | I | I | I | X | I | I | |
| 56 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 559 | 5590 | 55900 | X | X | X | X | X | X | X | I | B | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | X | T | T | T | B | X | X | T | | |
| 57 | Pencucian dan Salon Mobil | 452 | 4520 | 45202 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | I | X | X | B | B | B | X | X | X | I | T | X | B | B | X | X | I | T | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayanan Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 58 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 522 | 5229 | 52292 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | I | X | X | I | I | I | T | T | T | T | I | X | T | T | X | X | I | T | |
| 59 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 141 | 1412 | 14120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T | I | I | I | T | T | T | I | T | I | I | I | T | X | X | T | |
| 60 | Produksi Es | 353 | 3530 | 35302 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | I | T | X | I | I | X | X | I | T | |
| 61 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 478 | 4781 | 47815 | T | X | X | X | X | X | X | I | X | I | I | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | I | T | |
| 62 | Perdagangan Furniture Eceran | 475 | 4759 | 47591 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | X | X | I | I | I | X | X | X | I | T | X | I | I | T | X | I | T | |
| 63 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 869 | 8690 | 86902 | T | T | T | T | T | X | T | T | X | T | T | X | X | T | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | B | X | I | T | |
| 64 | Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya | 841 | 8411 | 84119 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | I | X | T | T |
| 65 | Kepolisian | 842 | 8422 | 84231 | T | T | T | T | T | X | T | T | B | X | T | T | X | B | B | B | B | X | I | T | T | T | B | B | B | I | X | I | I | |
| 66 | Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata | 842 | 8422 | 84221 | T | T | T | T | T | X | T | T | B | X | T | T | X | B | B | B | B | X | I | T | T | T | B | B | B | I | X | I | I | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Cagar Budaya | | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 67 | Industri Produk Makanan Lainnya | 107 | 1079 | 10799 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 68 | Industri Minuman Lainnya | 110 | 1109 | 11090 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 69 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 139 | 1392 | 13921 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 70 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 141 | 1411 | 14111 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 71 | Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu | 142 | 1420 | 14200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 72 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | 162 | 1629 | 16292 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 73 | Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya | 170 | 1709 | 17099 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 74 | Industri Pencetakan Umum | 181 | 1811 | 18111 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 75 | Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) | 241 | 2410 | 24101 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | X | X | X | X | X | X | I | T | X | X | X | X | X | I | X | |
| 76 | Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer | 262 | 2621 | 26210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 77 | Industri Alat Musik Bukan Tradisional | 322 | 3220 | 32202 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 78 | Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin | 281 | 2811 | 28113 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 79 | Industri Furnitur dari Kayu | 310 | 3100 | 31001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 80 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum | 331 | 3312 | 33121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 81 | Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang | 110 | 1105 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 82 | Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik | 239 | 2392 | 23921 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 83 | Industri Tahu Kedelai | 103 | 1039 | 10392 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | I | X | T | T | T | I | I | I | I | T | I | I | I | X | X | T | T | |
| 84 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran | 851 | 8515 | 85151 | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | X | X | X | T | I | I | I | I | I | I | I | T | B | B | B | B | X | B | B | |
| 85 | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah | 851 | 8513 | 85131 | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | X | X | X | T | I | I | I | I | I | I | I | T | B | B | B | B | X | B | B | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 86 | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 851 | 8513 | 85132 | X | T | T | T | T | X | X | T | T | X | X | X | X | X | T | I | I | I | I | I | I | I | T | B | B | B | B | X | B | B |
| 87 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah | 851 | 8511 | 85111 | X | T | T | T | T | X | X | T | T | X | X | X | X | X | T | I | I | I | I | I | I | I | T | B | B | B | B | X | B | B |
| 88 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta | 851 | 8512 | 85122 | X | T | T | T | X | X | X | T | T | X | X | X | X | X | T | I | I | I | I | I | I | I | T | B | B | B | B | X | B | B |
| 89 | Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah | 852 | 8521 | 85210 | X | T | T | T | X | X | X | T | T | X | X | X | X | X | T | I | I | I | I | I | I | I | T | B | B | B | B | X | B | B |
| 90 | Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah | 853 | 8531 | 85311 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | B | B | T | X | B | B | B | B | I | I | I | I | T | B | B | B | B | X | B | B |
| 91 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | 854 | 8549 | 85495 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | B | B | T | X | B | B | B | B | I | I | I | I | T | B | B | B | B | X | B | B |
| 92 | Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah | 852 | 8523 | 85230 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | B | B | T | X | B | B | B | B | I | I | I | I | X | B | B | B | B | X | B | B |
| 93 | Pendidikan Pesantren Lainnya | 854 | 8545 | 85451 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | B | B | T | X | B | B | B | B | I | I | I | I | X | B | B | B | B | X | B | B |
| 94 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | 861 | 8610 | 86101 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | B | X | X | X | B | X | B | B |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 95 | Aktivitas Rumah Sakit Swasta | 861 | 8610 | 86103 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | B | X | X | X | B | X | B | B | |
| 96 | Aktivitas Rumah Sakit Lainnya | 861 | 8610 | 86109 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | B | X | X | X | B | X | B | B |
| 97 | Aktivitas Puskesmas | 861 | 8610 | 86102 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | B | X | X | X | B | X | B | B |
| 98 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 869 | 8690 | 86903 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | B | X | X | X | B | X | B | B |
| 99 | Aktivitas Praktik Dokter | 862 | 8620 | 86201 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | T | T | T | T | X | I | I | I | I | I | I | I | B | I | I | I | B | X | B | B |
| 100 | Aktivitas Praktik Dokter Spesialis | 862 | 8620 | 86202 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | T | T | T | T | X | I | I | I | I | I | I | I | B | I | I | I | B | X | B | B |
| 101 | Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter gigi | 869 | 8690 | 86901 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | T | T | T | T | X | I | I | I | I | I | I | B | I | I | I | B | X | B | B | |
| 102 | Aktivitas Klinik Swasta | 861 | 8610 | 86105 | X | X | X | X | X | X | X | T | T | X | T | T | T | T | X | I | I | I | I | I | I | B | I | I | I | B | X | B | B | |
| 103 | Perpustakaan dan Arsip Pemerintah | 910 | 9101 | 91011 | X | T | T | T | T | T | X | T | T | X | I | I | T | X | X | B | B | B | X | X | X | X | B | T | I | I | I | X | X | I |
| 104 | Fasilitas Gelanggang/Arena | 931 | 9311 | 93113 | X | I | I | I | I | T | I | I | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | X | I | B | |
| 105 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 931 | 9311 | 93119 | X | I | I | I | I | T | I | I | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | X | I | B | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 106 | Fasilitas Stadion | 931 | 9311 | 93111 | X | I | I | I | I | T | I | I | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | T | T | T | T | T | X | I | B | |
| 107 | Aktivitas Terminal Darat | 522 | 5221 | 52211 | X | X | X | X | X | X | T | B | X | B | B | X | T | T | X | X | X | I | I | I | I | X | T | T | B | X | X | I | B | |
| 108 | Museum Yang Dikelola Pemerintah | 910 | 9102 | 91021 | X | X | X | X | X | X | I | B | X | I | I | T | X | X | T | T | T | X | T | X | T | T | I | T | T | I | X | I | I | |
| 109 | Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya | 012 | 0129 | | X | T | X | X | X | X | T | I | X | I | I | I | X | B | T | T | T | X | X | X | X | X | T | T | T | X | X | I | T | |
| 110 | Peternakan Unggas | 014 | 0146 | | X | I | X | X | X | X | T | I | X | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | X | T | |
| 111 | Peternakan Domba dan Kambing | 014 | 0144 | | X | I | X | X | X | X | T | I | X | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | X | T | |
| 112 | Peternakan sapi dan kerbau | 014 | 0141 | | X | I | X | X | X | X | T | I | X | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | X | T | |
| 113 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 014 | 0149 | 01497 | X | I | X | X | X | X | T | I | X | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | X | T | |
| 114 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 016 | 0129 | 01629 | X | I | X | X | X | X | T | I | X | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | X | T | |
| 115 | Budidaya Ikan Air Payau | 032 | 0325 | | X | I | X | X | X | X | T | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | X | T | |
| 116 | Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba | 032 | 0322 | 03223 | X | I | X | X | X | X | T | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | X | T | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Sampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | | |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | | | |
| 117 | Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam | 032 | 0322 | 03221 | I | I | X | X | X | X | X | T | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | X | T | | | |
| 118 | Kolam Pemancingan | 932 | 9324 | 93244 | I | I | B | B | B | X | X | T | I | I | I | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | X | T | | | |
| 119 | Aktivitas Pelabuhan Perikanan | 522 | 5222 | 52224 | I | X | X | X | X | X | X | T | I | I | I | I | T | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T | | |
| 120 | Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan | 081 | 0810 | 8101 | B | B | X | X | X | X | X | B | B | X | X | T | I | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | | |
| 121 | Penggalian Kapur/Gamping | 081 | 0810 | 8102 | B | B | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | I | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | | |
| 122 | Penggalian Kerikil/Sirtu | 081 | 0810 | 8103 | B | B | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | I | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | | |
| 123 | Penggalian Tanah dan Tanah liat | 081 | 0810 | 8105 | B | B | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | I | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | | |
| 124 | Pengumpulan Air Limbah Berbahaya | 370 | 3701 | 37012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X | I | T |
| 125 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | 422 | 4220 | 42206 | B | T | T | T | T | T | T | I | B | X | I | I | I | X | B | T | T | T | B | B | B | B | X | B | B | B | T | X | I | T | | |
| 126 | Pertahanan dan Keamanan | 842 | 8422 | | T | T | T | T | T | T | T | X | T | X | T | T | T | T | T | T | T | T | I | T | T | T | T | T | T | T | T | X | B | T | | |
| 127 | Pembangkitan Tenaga Listrik | 351 | 3511 | 35111 | B | B | B | X | B | X | X | X | B | X | T | T | T | T | X | I | I | I | X | T | X | B | X | T | X | X | T | X | X | T | | |
| 128 | Transmisi Tenaga Listrik | 351 | 3511 | 35112 | B | B | B | X | B | X | X | X | B | X | B | B | B | B | X | B | B | B | B | X | X | I | B | B | X | X | B | X | B | B | | |

| No | Jenis Kegiatan | Kode KBLI | | | Zona Lindung | | | | | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | Zona Cagar Budaya | Zona Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Zona Perikanan | | Zona Pertambangan | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Saran Pelayananana Umum | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan |
| | | 3 digit | 4 digit | 5 digit | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Cagar Budaya | Ekosistem Mangrove | Zona Badan Air | Perikanan Tangkap | Perikanan Budi Daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Ruang Terbuka Non Hijau | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan |
| | | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | CB | EM | BA | IK-1 | IK-2 | MBT | KPI | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | RTNH | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | | | |
| 129 | Distribusi Tenaga Listrik | 351 | 3511 | 35113 | B | B | B | X | B | X | X | X | B | X | B | B | B | X | I | I | I | B | B | X | I | B | B | B | B | B | X | B | B | |
| 130 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 422 | 4220 | 42207 | T | T | T | T | T | T | T | T | X | T | T | T | T | I | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | T | T | |
| 131 | Wisata Budaya Lainnya | 910 | 9102 | 91029 | I | I | I | I | I | I | I | I | B | I | B | B | T | I | I | I | I | X | X | X | X | I | B | B | B | B | X | B | B | |
| 132 | Daya Tarik Wisata Alam | 932 | 9322 | | I | I | I | I | I | I | I | X | I | X | I | X | X | I | I | I | I | B | X | X | X | I | I | B | B | I | X | B | I | |

I : Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
T : Pemanfaatan bersyarat secara terbatas
B : Pemanfaatan bersyarat tertentu
X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

| ZONA | ZONA | SUB-ZONA | KODE | KDB maksimum (%) | KLB maksimum | KDH minimal (%) |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|--------------|-----------------|
| Lindung | Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS | 30 | 0,3 | 70 |
| | Ruang Terbuka Hijau | Rimba Kota | RTH-1 | 10 | 0,2 | 90 |
| | | Taman Kota | RTH-2 | 10 | 0,2 | 90 |
| | | Taman Kecamatan | RTH-3 | 10 | 0,2 | 90 |
| | | Taman Kelurahan | RTH-4 | 10 | 0,2 | 90 |
| | | Pemakaman | RTH-7 | 10 | 0,2 | 90 |
| | | Jalur Hijau | RTH-8 | 0 | 0 | 100 |
| | Cagar Budaya | Cagar Budaya | CB | 20 | 0,2 | 80 |
| | Ekosistem <i>Mangrove</i> | Ekosistem <i>Mangrove</i> | EM | 10 | 0,2 | 90 |
| Badan Air | Badan Air | BA | 0 | 0 | 0 | |
| Budi Daya | Perikanan | Perikanan Tangkap | IK-1 | 60 | 0,3 | 40 |
| | | Perikanan Budi Daya | IK-2 | 60 | 0,3 | 40 |
| | Pertambangan | Peruntukan Pertambangan Batuan | MBT | 60 | 1,5 | 40 |
| | Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri | KPI | 70 | 1,5 | 30 |
| | Pariwisata | Pariwisata | W | 70 | 1 | 30 |
| | Perumahan | Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | 70 | 1,2 | 30 |
| | | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | 70 | 1,2 | 30 |
| | | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | 70 | 1,2 | 30 |
| | Sarana Pelayanan Umum | Sarana Pelayanan Umum Skala Kota | SPU-1 | 70 | 1,5 | 30 |
| | | Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan | SPU-2 | 70 | 1,5 | 30 |
| | | Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan | SPU-3 | 70 | 1,5 | 30 |
| | | Sarana Pelayanan Umum Skala RW | SPU-4 | 65 | 1,5 | 35 |
| Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang Terbuka Non Hijau | RTNH | 60 | 1 | 40 | |

| ZONA | ZONA | SUB-ZONA | KODE | KDB maksimum (%) | KLB maksimum | KDH minimal (%) |
|------|-------------------------|---------------------------------|------|------------------|--------------|-----------------|
| | Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1 | 80 | 1,5 | 20 |
| | | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | 80 | 1,5 | 20 |
| | | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | 80 | 1,5 | 20 |
| | Perkantoran | Perkantoran | KT | 70 | 1,2 | 30 |
| | Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Persampahan | PP | 50 | 1 | 50 |
| | Transportasi | Transportasi | TR | 70 | 0,5 | 30 |
| | Pertahanan Dan Keamanan | Pertahanan Dan Keamanan | HK | 70 | 1 | 30 |

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

| ZONA | ZONA | SUB-ZONA | KODE | Ketinggian Bangunan (TB) maksimum | Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m) | Jarak bebas antar bangunan (JBAB) minimal (m) |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|---|---|
| Lindung | Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS | 8 | 2 | 3 |
| | Ruang Terbuka Hijau | Rimba Kota | RTH-1 | 4 | 1,5 | 3 |
| | | Taman Kota | RTH-2 | 4 | 1,5 | 3 |
| | | Taman Kecamatan | RTH-3 | 4 | 1,5 | 3 |
| | | Taman Kelurahan | RTH-4 | 4 | 1,5 | 3 |
| | | Pemukaman | RTH-7 | 4 | 1,5 | 3 |
| | | Jalur Hijau | RTH-8 | 4 | 1,5 | 3 |
| | Cagar Budaya | Cagar Budaya | CB | 8 | 2 | 4 |
| | Ekosistem <i>Mangrove</i> | Ekosistem <i>Mangrove</i> | EM | 8 | 2 | 4 |
| Badan Air | Badan Air | BA | 0 | 0 | 0 | |
| Budi Daya | Perikanan | Perikanan Tangkap | IK-1 | 8 | 2 | 6 |
| | | Perikanan Budi Daya | IK-2 | 8 | 2 | 6 |
| | Pertambangan | Peruntukan Pertambangan Batuan | MBT | 12 | 3 | 6 |
| | Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri | KPI | 12 | 3 | 6 |
| | Pariwisata | Pariwisata | W | 12 | 3 | 6 |
| | Perumahan | Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | 20 | 4 | 8 |
| | | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | 16 | 4 | 6 |
| | | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | 12 | 4 | 6 |
| | Sarana Pelayanan Umum | Sarana Pelayanan Umum Skala Kota | SPU-1 | 60 | 5 | 7 |
| Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan | | SPU-2 | 40 | 4 | 6 | |

| ZONA | ZONA | SUB-ZONA | KODE | Ketinggian Bangunan (TB) maksimum | Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m) | Jarak bebas antar bangunan (JBAB) minimal (m) |
|------|-------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---|---|
| | | Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan | SPU-3 | 20 | 3 | 6 |
| | | Sarana Pelayanan Umum Skala RW | SPU-4 | 16 | 3 | 6 |
| | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang Terbuka Non Hijau | RTNH | 8 | 3 | 6 |
| | Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1 | 40 | 4 | 7 |
| | | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | 24 | 4 | 6 |
| | | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | 24 | 4 | 6 |
| | Perkantoran | Perkantoran | KT | 40 | 4 | 7 |
| | Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Persampahan | PP | 12 | 4 | 6 |
| | Transportasi | Transportasi | TR | 8 | 2 | 6 |
| | Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan | HK | 12 | 4 | 6 |

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| Lindung | Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki; 2. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan. |
| | Ruang Terbuka Hijau | Rimba Kota | RTH-1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki; 2. Menyediakan hidran; 3. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan; 4. Menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran; 5. Menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan 6. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. |
| | | Taman Kota | RTH-2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tempat duduk pengunjung 2. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki; 3. Menyediakan hidran; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan; 5. Menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, dan pos pemadam kebakaran; 6. Menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi |

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|------|------|-----------------|---------------|---|
| | | | | aksesibilitas untuk difabel; dan
7. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. |
| | | Taman Kecamatan | RTH-3 | 1. Menyediakan tempat duduk pengunjung
2. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
3. Menyediakan hidran;
4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
5. Menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan;
6. Menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
7. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. |
| | | Taman Kelurahan | RTH-4 | 1. Menyediakan tempat duduk pengunjung
2. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
3. Menyediakan hidran;
4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
5. Menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan;
6. Menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
7. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. |
| | | Pemakaman | RTH-7 | 1. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
2. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan; |

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 3. Menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan 4. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. |
| | | Jalur Hijau | RTH-8 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki; dan 2. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan. |
| | Cagar Budaya | Cagar Budaya | CB | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait. 2. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki; 3. Menyediakan hidran; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan; 5. Menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan; 6. Menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; 7. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; dan 8. Menyediakan jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan cagar budaya yang hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi cagar budaya setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. |
| | Ekosistem <i>Mangrove</i> | Ekosistem <i>Mangrove</i> | EM | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan; 2. Menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, dan pos pemadam |

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|-----------|--------------|--------------------------------|---------------|---|
| | | | | kebakaran; dan
3. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. |
| | Badan Air | Badan Air | BA | - |
| Budi Daya | Perikanan | Perikanan Tangkap | IK-1 | 1. Menyediakan parkir
2. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
3. Menyediakan hidran;
4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
5. Menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola;
6. Menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;
7. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; |
| | | Perikanan Budi Daya | IK-2 | 1. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
2. Menyediakan hidran;
3. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan;
4. Menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan;
5. Menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan
6. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; |
| | Pertambangan | Peruntukan Pertambangan Batuan | MBT | 1. Menyediakan RTH
2. Menyediakan lahan parkir. |

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyediakan hidran; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilihan; 5. Menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan; 6. Menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; 7. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; dan 8. Menyediakan jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan pertambangan hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi pertambangan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. |
| | Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri | KPI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan RTH; 2. Menyediakan lahan parkir; 3. Menyediakan tempat bongkar muat barang; 4. Menyediakan hidran; 5. Menyediakan akses pemadam kebakaran; 6. Menyediakan jalur evakuasi bencana; 7. Menyediakan jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi; 8. Menyediakan jaringan drainase; dan 9. Menyediakan bak sampah dengan pemilahan. |
| | Pariwisata | Pariwisata | W | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tempat duduk pengunjung 2. Menyediakan lokasi perdagangan untuk UMKM; 3. Menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut |

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|------|-----------|----------------------------|---------------|---|
| | | | | <p>oleh instansi terkait;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyediakan parkir dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; 5. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; 6. Menyediakan bak sampah dengan pemilahan; dan 7. Menyediakan jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan pariwisata hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi pariwisata setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. |
| | Perumahan | Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan hidran; 2. Menyediakan akses pemadam kebakaran; 3. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 5. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau berupa taman 6. Menyediakan drainase; 7. Menyediakan jaringan air bersih; dan 8. Menyediakan jaringan listrik. |
| | | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan hidran; 2. Menyediakan akses pemadam kebakaran; 3. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 5. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau berupa taman. 6. Menyediakan jaringan air bersih; dan 7. Menyediakan jaringan listrik; |

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|---|
| | | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan hidran; 2. Menyediakan akses pemadam kebakaran; 3. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 5. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau berupa taman; 6. Menyediakan drainase; 7. Menyediakan jaringan air bersih; dan 8. Menyediakan jaringan listrik. |
| | Sarana Pelayanan Umum | Sarana Pelayanan Umum Skala Kota | SPU-1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan jalur pejalan kaki; 2. Menyediakan hidran; 3. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 5. Menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; 6. Menyediakan drainase; 7. Menyediakan jaringan air bersih; dan 8. Menyediakan jaringan listrik. |
| | | Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan | SPU-2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pengaturan parkir on street yang diatur oleh instansi terkait; 2. Menyediakan jalur pejalan kaki; 3. Menyediakan hidran; 4. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 5. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 6. Menyediakan jaringan air bersih; dan 7. Menyediakan jaringan listrik. |
| | | Sarana Pelayanan Umum Skala | SPU-3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pengaturan parkir on street yang |

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|------|-------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| | | Kelurahan | | <ul style="list-style-type: none"> 1. diatur oleh instansi terkait; 2. Menyediakan jalur pejalan kaki; 3. Menyediakan hidran; 4. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 5. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 6. Menyediakan jaringan air bersih; dan 7. Menyediakan jaringan listrik. |
| | | Sarana Pelayanan Umum Skala RW | SPU-4 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pengaturan parkir on street yang diatur oleh instansi terkait; 2. Menyediakan jalur pejalan kaki; 3. Menyediakan hidran; 4. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 5. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 6. Menyediakan jaringan air bersih; dan 7. Menyediakan jaringan listrik |
| | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang Terbuka Non Hijau | RTNH | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Lahan parkir; 2. Menyediakan hidran; 3. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 4. Menyediakan drainase; 5. Menyediakan jaringan air bersih; dan 6. Menyediakan jaringan listrik. |
| | Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan lahan parkir 2. Menyediakan hidran; 3. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 5. Menyediakan drainase; |

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|------|-------------|--------------------------------|---------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 6. Menyediakan jaringan air bersih; 7. Menyediakan jaringan listrik; 8. Menyediakan telekomunikasi; dan 9. Menyediakan jalan di sekitar kawasan perdagangan jasa skala kota dilengkapi lampu penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter. |
| | | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan lahan parkir 2. Menyediakan hidran; 3. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 5. Menyediakan drainase; 6. Menyediakan jaringan air bersih; 7. Menyediakan jaringan listrik; dan 8. Menyediakan telekomunikasi. |
| | | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan lahan parkir; 2. Menyediakan hidran; 3. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 5. Menyediakan jaringan air bersih; 6. Menyediakan jaringan listrik; dan 7. Menyediakan telekomunikasi. |
| | Perkantoran | Perkantoran | KT | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan lahan parkir; 2. Menyediakan hidran; 3. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; |

| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 5. Menyediakan drainase; 6. Menyediakan jaringan air bersih; 7. Menyediakan jaringan listrik; 8. Menyediakan telekomunikasi; dan 9. Menyediakan fasilitas pendukung berupa, pos keamanan dan pos pemadam kebakaran. |
| | Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Persampahan | PP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang pemilahan; 2. Menyediakan tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container; dan 3. Menyediakan pagar tembok keliling. |
| | Transportasi | Transportasi | TR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan jalur pejalan kaki; 2. Menyediakan parkir; 3. Menyediakan hidran; 4. Menyediakan jalur evakuasi bencana; 5. Menyediakan lebar jalan minimal 6 (enam) meter; 6. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 7. Menyediakan drainase; 8. Menyediakan jaringan air bersih; 9. Menyediakan jaringan listrik; 10. Menyediakan fasilitas pendukung berupa, pos keamanan dan pos pemadam kebakaran. |

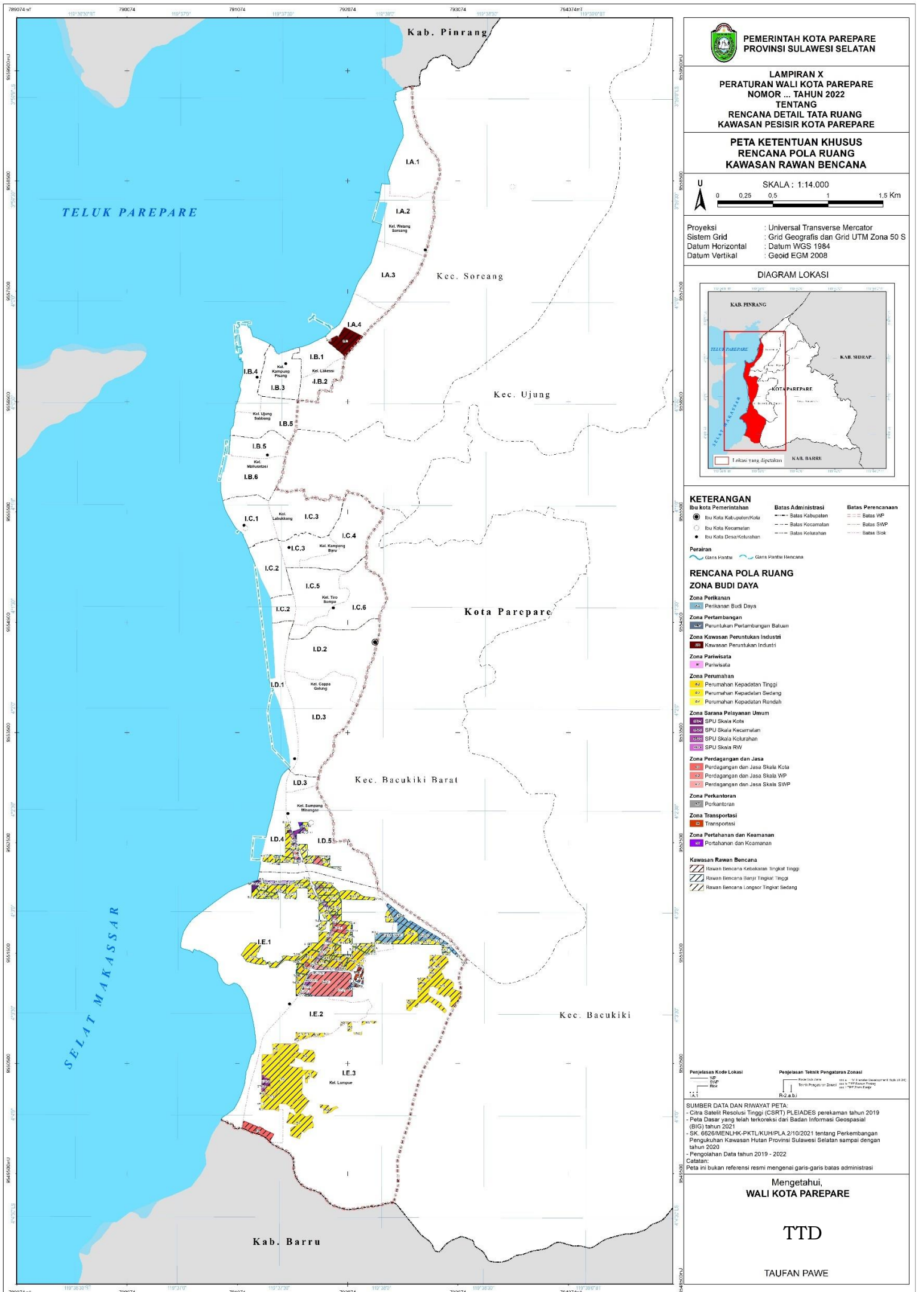
| Zona | Zona | Sub-Zona | Kode Sub-Zona | Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|
| | Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan | HK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan jalur pejalan kaki; 2. Menyediakan parkir; 3. Menyediakan hidran; 4. Menyediakan lebar jalan minimal 4 (empat) meter; 5. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; 6. Menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; 7. Menyediakan drainase; 8. Menyediakan jaringan air bersih; 9. Menyediakan jaringan listrik; 10. Menyediakan telekomunikasi; dan 11. Menyediakan fasilitas pendukung berupa, pos keamanan dan pos pemadam kebakaran. |

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE

**PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA**

SKALA : 1:14.000

Projeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| ● Ibu Kota Pemerintahan | — Batas Administrasi | --- Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kabupaten | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Kelurahan | --- Batas Blok |

Perairan

— Garis Pantai — Garis Pantai Rencana

**RENCANA POLA RUANG
 ZONA BUDI DAYA**

Zona Perikanan

— Perikanan Budi Daya

Zona Pertambangan

— Peruntukan Pertambangan Batuan

Zona Kawasan Peruntukan Industri

— Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata

— Pariwisata

Zona Perumahan

— Perumahan Kepadatan Tinggi
 — Perumahan Kepadatan Sedang
 — Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

— SPU Skala Kota
 — SPU Skala Kecamatan
 — SPU Skala Kelurahan
 — SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

— Perdagangan dan Jasa Skala Kota
 — Perdagangan dan Jasa Skala WP
 — Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran

— Perkantoran

Zona Transportasi

— Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan

— Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Rawan Bencana

— Rawan Bencana Kebakaran Tingkat Tinggi
 — Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
 — Rawan Bencana Longsor Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

— WP
 — SWP
 — RW

Penjelasan Teknik Pengantar Zonal

— R-1
 — R-2 a b

SUMBER DATA DAN RWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoneksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- SK. 6626/MENLHK-PTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2020
- Pengolahan Data tahun 2019 - 2022

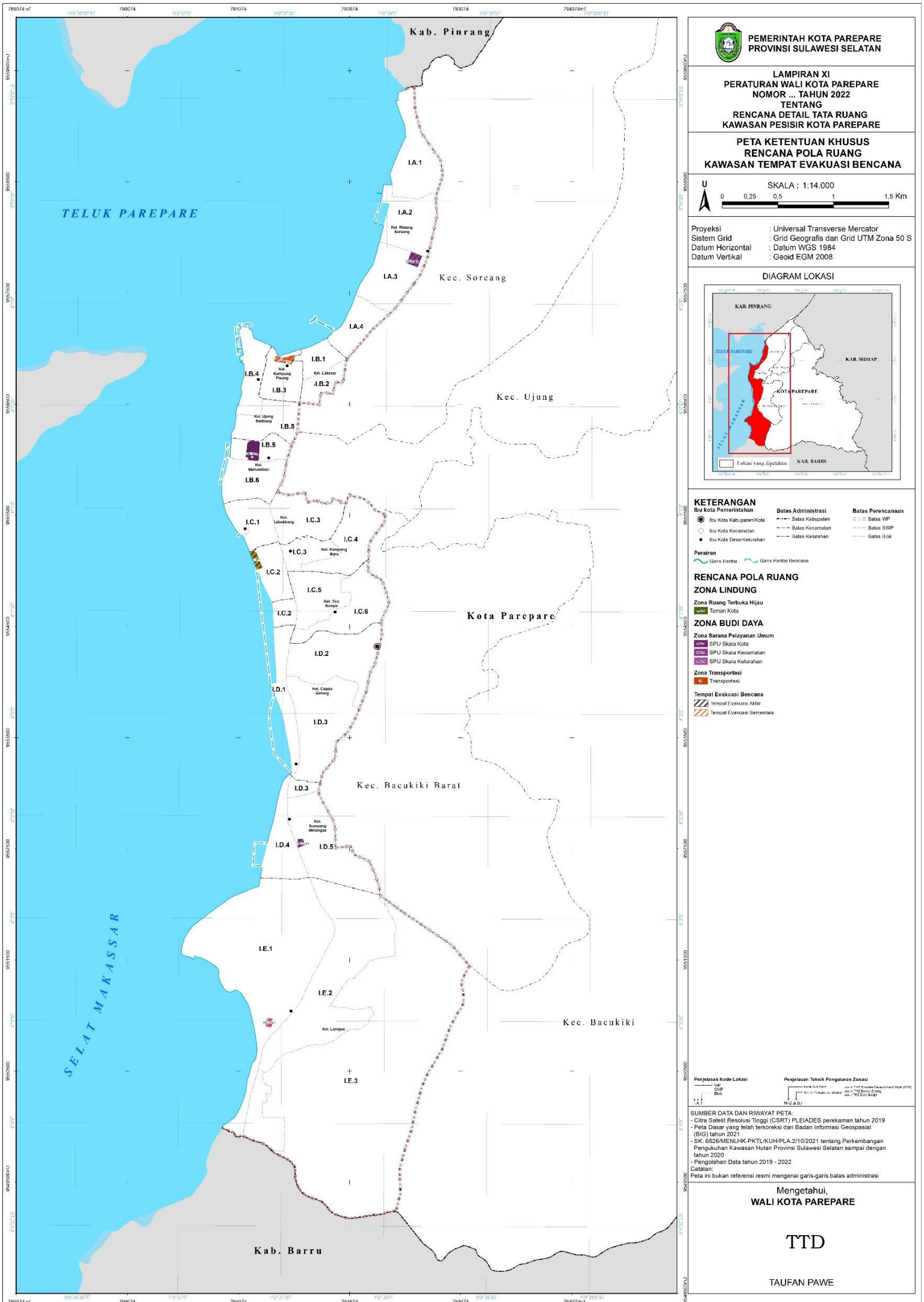
Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE**

**PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA : 1:14.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Administrasi | --- Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kabupaten | --- Batas WPP |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SIKP |
| | --- Batas Kelurahan | --- Batas Blok |

Perairan
 --- Garis Pantai
 --- Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 Taman Kota

ZONA BUDI DAYA
 Zona Sarana Pelayanan Umum
 SPU Skala Kota
 SPU Skala Kecamatan
 SPU Skala Kelurahan

Zona Transportasi
 Transportasi

Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Akhir
 Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| WPP | Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi |
| BKK | |
| BK | |
| BK.2.a.b) | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019
 - Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 - SK. 6626/MENLHK-PTL/KUH/PLA/2/10/2021 tentang Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2020
 - Pengalihan Data tahun 2019 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

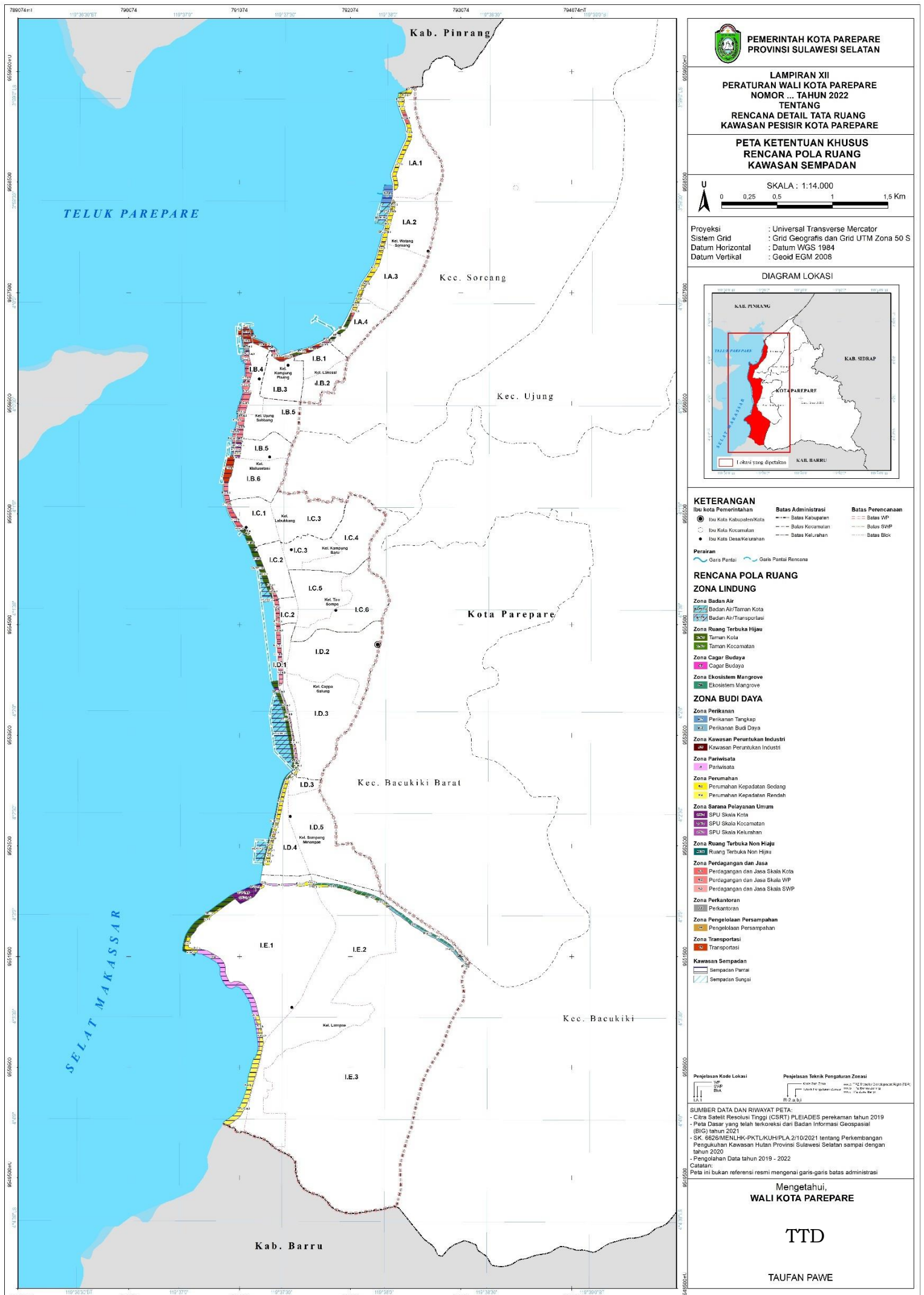
Mengetahui,
WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE

Kepala Dinas
 Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE**

**PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**

U
 0 0,25 0,5 1 1,5 Km
 SKALA : 1:14.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| ● Ibu Kota Pemerintahan | — Batas Administrasi | — Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | — Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan | — Batas SWP |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | — Batas Kelurahan | — Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

- Zona Badan Air
 - Badan Air/Taman Kota
 - Badan Air/Transportasi
- Zona Ruang Terbuka Hijau
 - Taman Kota
 - Taman Kecamatan
- Zona Cagar Budaya
 - Cagar Budaya
- Zona Ekosistem Mangrove
 - Ekosistem Mangrove

ZONA BUDI DAYA

- Zona Perikanan
 - Perikanan Tangkap
 - Perikanan Budi Daya
- Zona Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Peruntukan Industri
- Zona Pariwisata
 - Pariwisata
- Zona Perumahan
 - Perumahan Kepadatan Sedang
 - Perumahan Kepadatan Rendah
- Zona Sarana Pelayanan Umum
 - SPU Skala Kota
 - SPU Skala Kecamatan
 - SPU Skala Kelurahan
- Zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - Ruang Terbuka Non Hijau
- Zona Perdagangan dan Jasa
 - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
 - Perdagangan dan Jasa Skala WP
 - Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- Zona Perkantoran
 - Perkantoran
- Zona Pengelolaan Sampah
 - Pengelolaan Sampah
- Zona Transportasi
 - Transportasi

Kawasan Sempadan

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

| | |
|------|---------------------|
| IA.1 | Kec. Sorcang |
| IB.1 | Kec. Ujung |
| IC.1 | Kec. Bacukiki Barat |
| ID.1 | Kec. Bacukiki |
| IE.1 | Kec. Bacukiki |

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) PLEIADES perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- SK 6629/MIENLHK-PKTLKUH-PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2020
- Pengolahan Data tahun 2019 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

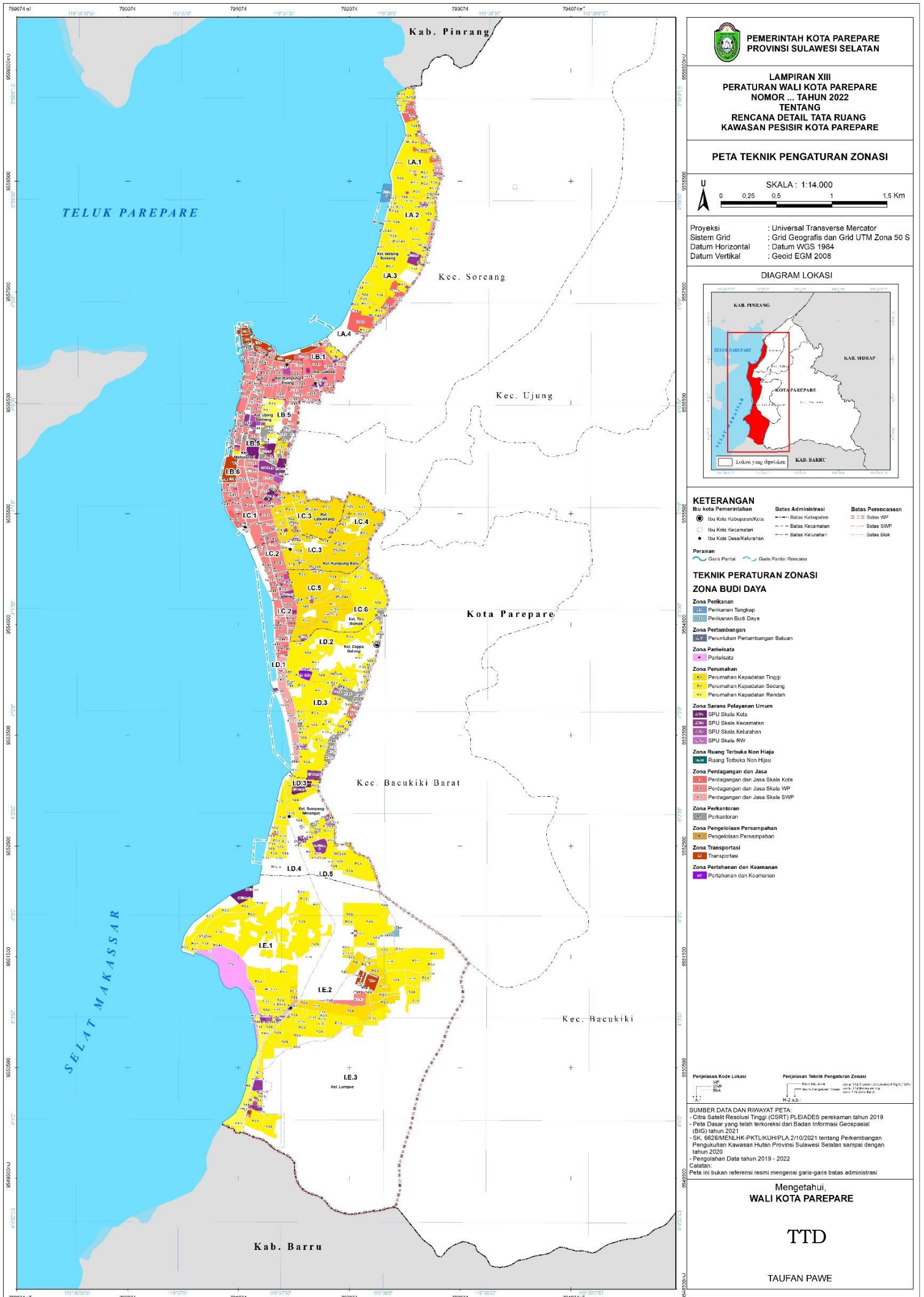
Mengetahui,
WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE

Kepala Dinas
 Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

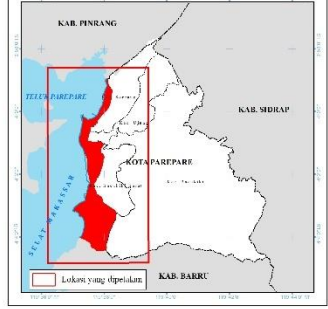
**LAMPIRAN XIII
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PESISIR KOTA PAREPARE**

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Ibu kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| Ibu Kota Kabupaten/Kota | Batas Kelurahan | Batas WP |
| Ibu Kota Kecamatan | Batas Kecamatan | Batas SWP |
| Ibu Kota Desa/Kelurahan | Batas Kelurahan | Batas SWP |

Perairan
 Garis Pantai
 Garis Pantai Rencana

TEKNIK PERATURAN ZONASI

- ZONA BUDI DAYA**
- Perikanan Tangkap
 - Perikanan Budi Daya
- Zona Pertambangan**
- Peruntukan Pertambangan Batuan
- Zona Pariwisata**
- Pariwisata
- Zona Perumahan**
- Perumahan Kepadatan Tinggi
 - Perumahan Kepadatan Sedang
 - Perumahan Kepadatan Rendah
- Zona Sarana Pelayanan Umum**
- SPU Skala Kota
 - SPU Skala Kecamatan
 - SPU Skala Kelurahan
 - SPU Skala RW
- Zona Ruang Terbuka Non Hijau**
- Ruang Terbuka Non Hijau
- Zona Perdagangan dan Jasa**
- Perdagangan dan Jasa Skala Kota
 - Perdagangan dan Jasa Skala WP
 - Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- Zona Perkantoran**
- Perkantoran
- Zona Pengelolaan Persampahan**
- Pengelolaan Persampahan
- Zona Transportasi**
- Transportasi
- Zona Pertahanan dan Keamanan**
- Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PLEIADES perekaman tahun 2019
 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 - SK. 6626/MENLHK-PKTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2021
 - Pengolahan Data tahun 2019 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE